



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	54
3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	67
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025	67
4.2 Manajemen Resiko Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025.....	220
BAB V PENUTUP	236
LAMPIRAN	

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, November 2024

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**



AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680617 199803 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, maupun perencanaan pembangunan tahunan.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 Ayat 1 diamanatkan bahwa setelah penyampaian Rancangan Awal RKPD, Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja PD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkembang di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dalam upaya mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”**.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025 juga diarahkan untuk melanjutkan arahan dan prioritas program Pj.Gubernur, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2023, keberlanjutan rencana kerja tahun 2024, dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD dan berbagai pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025 berpedoman kepada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, serta mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, reviu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana

Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan mendukung pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 2026;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Renja Disnakertrans dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan pada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3	Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
4.2.	Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah:

Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Tujuan 1						
	Mengurangi Jumlah Pengangguran Sasaran	Persentase pengangguran yang ditangani	28,55	29,27	102,52	Sangat baik
1.1	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	8,19	8,26	100,85	Sangat baik
		Tingkat produktivitas tenagakerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	54,62	55,16	100,99	Sangat baik
1.2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari tenaga kerja yang ditempatkan	71,01	71,18	100,24	Sangat baik
1.3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91,67	92,04	100,40	Sangat baik
1.4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan Lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	82,97	81,58	101,70	Sangat baik
1.5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	57,14	65,71	114,99	Sangat baik
1.6	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	3,45	4,96	143,77	Sangat baik
Tujuan 2						
	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai kepuasan masyarakat	79	84,89	107,46	Sangat baik
Sasaran						
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai kepuasan masyarakat	75,00	84,89	113,19	Sangat baik
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,50	83,10	110,07	Sangat baik
Rata - rata capaian					108,74	

1. Sasaran Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten dengan tingkat

- capaian sebesar 100,85 persen dan indikator tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/juta) dengan tingkat capaian sebesar 100,99 persen.
2. Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator persentase pencari tenaga kerja yang ditempatkan dengan tingkat capaian sebesar 100,24 persen.
 3. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) tingkat capaian sebesar 100,40 persen.
 4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan Lingkungan Kerja) telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator persentase penurunan pelanggaran ketenagakerjaan dengan tingkat capaian sebesar 101,70 persen.
 5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah dengan tingkat capaian sebesar 114,99 persen.
 6. Sasaran Meningkatnya Penempatan Transmigran pada Daerah Tujuan Transmigrasi telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi dengan tingkat capaian sebesar 143,77 persen.
 7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator nilai kepuasan masyarakat dengan tingkat capaian sebesar 113,19 persen.
 8. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Diukur melalui indikator nilai SAKIP perangkat daerah dengan tingkat capaian sebesar 110,07 persen.

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023, dapat diuraikan bahwa sebanyak 17 indikator program urusan Tenaga Kerja dan 2 indikator urusan Transmigrasi realisasinya sudah tercapai bahkan melampaui target akhir Renstra.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										
1		Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,14	25,90	26,14	28,86	110,41	26,40	28,86	98,00
2		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	-	89,56	89,57	89,99	100,47	89,58	89,99	99,98
3	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3	%	44,00	82,00	44,00	44,00	100,00	-	-	-
4		Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3	%	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Persentase perusahaan dilakukan pengujian higiene, kesehatan kerja	%	76,00	90,00	76,00	76,00	100,00	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
6		Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	55,00	54,00	55,00	80,00	145,45	55,71	55,71	97,82
7		Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	29,00	246,00	29,00	32,99	113,76	29,41	32,99	96,33
8		Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62,00	61,00	62,00	62,00	100,00	62,08	62,08	99,61
9		Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	-	-	-	-	-	60,16	60,16	32,49
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										
10		Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38,50	37,50	38,50	38,50	100,00	38,14	38,50	121,39
11		Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	8,19	12,20	8,19	8,26	100,85	-	-	-
12		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	1,12	4,13	2,74	6,16	224,82	2,88	2,88	82,52

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
13		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	16,00	68,72	46,75	65,37	139,83	46,90	46,90	99,51
14		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	6,67	9,44	9,38	11,96	127,51	9,45	11,96	98,95
15		Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,25	2,45	2,25	2,27	100,89	2,30	2,30	95,83
16		Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,20	4,01	4,20	4,20	100,00	4,40	4,40	94,02
17		Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%	13,04	13,38	13,04	24,16	185,28	13,13	13,13	98,72
18	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	27,27	85,00	27,27	27,27	100,00	29,09	29,09	105,44

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
19	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (Bidang Lattas)	%	30,00	26,67	30,00	26,35	87,83	30,77	30,77	105,27
20		Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang industri (BLK Cilacap)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
21		Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (BLK Cilacap)	%						0,00	0,00	0,00
22		Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dg. BLK (BLK Cilacap)	%						0,00	0,00	0,00
23		Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (BLK Cilacap)	%	32,00	91,33	32,00	32,00	100,00	12,61	12,61	105,08

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
24		Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) (BLK Cilacap)	%	22,00	20,00	22,00	22,00	100,00	24,94	24,94	100,56
25		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (BLK Cilacap)	%	30,00	-	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26		Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi di bidang bidang jasa, pemagangan, bahasa asing dan pekerja migran (BLK Semarang 1)	%	75,00	80,00	75,00	100,00	133,33	-	-	-
27		Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (BLK Semarang 1)	%						0,00	0,00	0,00
28		Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan (BLK Semarang 1)	%	51,00	30,00	51,00	51,27	100,53	1,33	1,33	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
29		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT (BLK Semarang 1)	%						2,40	2,40	133,33
30		Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	%						0,00	0,00	0,00
31		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (BLK Semarang 1)	%	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
32		Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian (BPK Transmigrasi)	%	66,00	56,00	66,00	66,00	100,00	-	-	-
33		Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (BPK Transmigrasi)	%						66,67	66,67	100,00
34		Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	%						0,00	0,00	0,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
35		Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) (BPK Transmigrasi)	%	76,00	75,00	76,00	76,00	100,00	6,40	6,40	100,00
36		Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (BPK Transmigrasi)	%	86,00	85,00	86,00	86,00	100,00	64,00	64,00	100,00
37		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (BPK Transmigrasi)	%	30,00	-	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38		Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (Bidang Lattas)	%	83,33	66,67	83,33	83,33	100,00	75,00	75,00	112,49

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
39		Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan/koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan/TNA dikalikan 100 persen (BLK Semarang 2)	Unit						0,00	0,00	0,00
40		Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT) (BLK Semarang 2)	%	71,00	75,68	71,00	76,00	107,04	71,00	76,00	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
41		Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (BLK Semarang 2)	%	19,00	21,05	19,00	30,96	162,95	4,77	4,77	100,00
42		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (BLK Semarang 2)	%	30,00	-	30,00	-	-	100,00	100,00	100,00
43	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (Bidang Lattas)	%	21,00	83,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00
44		Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (BLK Semarang 2)	%	19,00	92,00	19,00	90,32	475,37	0,00	0,00	0,00
45	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan (BLK Semarang 2)	%	3,00	1,00	3,00	0,14	4,67	0,00	0,00	0,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										
46		Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	-	34,00	57,14	65,71	115,00	-	-	-
47		Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%						62,85	62,85	84,61
48	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	90,00	95,00	90,00	90,00	100,00	-	-	-
49		Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%						28,57	28,57	83,32
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										
50		Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	71,01	70,52	71,01	71,09	100,11	71,03	71,09	99,94
51		Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68,00	55,26	68,00	68,19	100,28	68,10	68,19	99,42

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
52	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja: Antar Kerja Lokal (AKL); Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19,25	44,00	19,25	53,26	276,68	19,37	19,37	99,33
53	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	58,33	68,00	58,33	64,37	110,35	60,00	64,37	101,80
55		Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal.	%	51,00	50,88	51,00	51,72	101,41	51,85	51,85	103,70
56	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	75,00	133,00	75,00	78,00	104,00	75,00	78,00	125,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
57		Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	2,83	3,00	2,83	2,83	100,00	2,83	2,83	125,22
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI										
58		Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,41	3,99	3,60	3,97	110,28	3,61	3,97	94,75
59		Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,41	5,28	3,60	4,96	137,78	3,61	4,96	94,75
60	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	3,45	3,18	3,60	3,45	95,83	0,00	0,00	0,00
61		Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	3,60	3,28	3,60	3,60	100,00	10,00	10,00	87,49
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										
62		Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	87,70	97,70	97,80	98,50	100,72	98,00	98,50	99,59

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
63		Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	47,61	54,59	49,72	49,72	100,00	49,75	49,75	99,90
64		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,00	98,57	96,00	98,41	102,51	96,15	98,41	98,41
65		Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	36,00	36,24	43,00	43,00	100,00	44,27	44,27	94,57
66	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	25,00	27,31	25,00	25,00	100,00	26,87	26,87	99,22
67	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	%	47,44	46,62	47,44	47,44	100,00	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
68		Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%						49,74	49,74	99,86
69		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial	%	11,00	15,00	11,00	27,00	245,45	-	-	-
70		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%						96,15	96,15	98,41
71		Prosentase perusahaan dengan kategori rawan/setengah rawan	%						36,70	36,70	103,38
72		Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit	%	28,00	30,00	28,00	73,00	260,71	-	-	-
73		Persentase perusahaan yang telah dibina pembutan LKS Bipartit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	17,00	15,00	17,00	17,00	100,00	80,00	80,00	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
74	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	2,28	2,16	2,28	2,28	100,00	2,28	2,28	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang melampaui target karena didukung oleh anggaran APBD, juga didukung melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), APBN, atau luncturan dari Kementerian. Selain itu, penggunaan media online (zoom) dalam pelaksanaan kegiatan juga menambah capaian kinerja.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		V	8,19	-	8,26	-	
2	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi		V	38,50	38,14	38,50	38,50	
3	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi		V	2,25	2,3	2,27	2,30	
4	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas		V	4,20	4,40	4,20	4,40	
5	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri		V	1,12	2,88	6,16	2,88	Capaian kinerja didukung dengan anggaran melalui DBHCHT dan/atau APBN

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian		V	6,67	9,45	11,96	11,96	Capaian kinerja didukung anggaran melalui DBHCHT dan/atau APBN
7	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan		V	13,04	13,13	24,16	13,13	Capaian kinerja Didukung anggaran DBHCHT
8	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran		V	16,00	46,90	65,37	46,90	BLK Semarang 1 mendapatkan pelatihan bersumber dana APBN sehingga terjadi peningkatan capaian melebihi target tahunan
9	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal		V	71,01	71,03	71,09	71,09	
10	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal		V	68,00	68,10	68,19	68,19	
11	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan		V	87,70	98,00	98,50	98,50	
12	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah		V	36,00	44,27	43,00	44,27	
13	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk		V	47,61	49,75	49,72	49,75	
14	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial		V	96,00	96,15	98,41	98,41	

No	Indikator	SPM/Stadar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		V	-	89,58	89,99	89,99	
16	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3		V	26,14	26,40	28,86	28,86	Capaian kinerja didukung anggaran APBN / luncuran dari Pusat.
17	Persentase Kab/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan		V	-	-	65,71	-	
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja		V	-	62,85	-	62,85	
18	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi			3,41	3,61	4,96	4,96	
19	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian			3,41	3,61	3,97	3,97	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 ini, dalam melaksanakan tugas pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian didasarkan pada indikator urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yaitu Kepmendagri 050/3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021, serta peraturan terbaru yaitu Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 untuk menyusun Renja 2025 yang mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga maupun kerjasama antar provinsi dalam rangka pencapaian kinerja Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan dan hambatan yang berdampak terhadap pencapaian serta tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan pelayanan OPD.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Sakernas Agustus) sebesar 5,13 persen.

Menurut kategori pendidikan, TPT dari tamatan SMA Kejuruan masih menjadi yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,89 persen. TPT dari tamatan SMA Umum sebesar 7,09 persen; TPT tamatan Diploma IV/S1/S2/S3 5,60 persen; TPT tamatan Diploma I/II/III 5,09 persen; TPT tamatan SMP 5,04 persen; dan TPT tamatan SD ke bawah sebesar 2,74 persen.

Penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebanyak 42,65 persen. Angka tersebut turun sebesar 2,86 persen jika dibandingkan tahun 2022. Penduduk yang bekerja dengan tamatan pendidikan SMP sebanyak 20,59 persen, naik sebesar 0,55 persen dibandingkan tahun 2022. Penduduk yang bekerja dari pendidikan tamatan SMA Kejuruan sebanyak 14,05 persen, meningkat sebesar 0,98 persen dibandingkan tahun 2022; tamatan SMA Umum sebanyak 13,68 persen. Persentase kumulatif pekerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Diploma IV/S1/S2/S3 masih merupakan yang terkecil yaitu 9,03 persen.

b. Berkurangnya Instruktur di BLK Pemerintah (Provinsi dan

Kabupaten/Kota), formasi baru belum sebanding dengan instruktur yang pensiun serta persebarannya.

- c. Terbatasnya staf/pegawai yang dapat memahami SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional).
 - d. Terbatasnya fasilitasi kegiatan untuk UJK (Uji Kompetensi) dan Sertifikasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
 - e. Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan ketentuan/pedoman.
 - f. Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin serta produktivitas pencari kerja dan tenaga kerja.
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

- a. Angka pengangguran masih cukup tinggi.
- b. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
- c. Banyak lowongan tenaga kerja yang dibutuhkan pengguna tenaga kerja belum terpenuhi, hal ini dikarenakan beberapa hal:
 - 1) Kompetensi calon pencari kerja belum sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna tenaga kerja/perusahaan
 - 2) Belum ada transportasi/akses transportasi menuju lokasi perusahaan, sehingga tenaga kerja kesulitan untuk berangkat kerja
 - 3) Biaya sewa tempat tinggal/rumah/kamar/kost untuk tenaga kerja di sekitar perusahaan yang baru dibangun tersebut mahal
 - 4) Upah dan lowongan kerja tidak sesuai dengan minat pencari kerja
- d. Peserta pemberdayaan, baik pencari kerja dan masyarakat maupun PMI purna dan keluarganya tidak bisa mengembangkan pembekalan untuk berwirausaha yang diberikan. Karena antusias masyarakat melanjutkan usaha rendah dan mudah menyerah saat hasil tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu tidak ada fasilitasi modal untuk sarana usaha dan modal usaha, serta keterbatasan akses pasar.
- e. Alokasi penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tidak seimbang dengan jumlah masyarakat Jawa Tengah yang telah mendaftar sebagai calon transmigrasi. Jumlah animo tahun 2019 sebanyak 2.358 KK, kuota dari Pusat = 243 KK (APBD dan APBN), realisasi penempatan sebanyak 185 KK. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 telah mendukung dengan pola *sharing* dengan provinsi tujuan penempatan transmigrasi (Provinsi Kalimantan Utara) untuk sebanyak 100 KK. Pada tahun 2020 dengan animo sebanyak 1.263 KK dan tidak ada penempatan dikarenakan pandemi Covid-19, juga sudah tidak dilaksanakan pola *sharing* dimulai tahun 2020. Pada

tahun 2021 telah menempatkan calon transmigran pada daerah tujuan transmigrasi sebanyak 10 KK dan di tahun 2022 ditempatkan sebanyak 53 KK dari animo transmigrasi yang sebanyak 1.003 animo transmigrasi. Sedangkan pada tahun 2023 telah dilakukan penempatan calon transmigran sebanyak 20 KK (Kepala Keluarga) dari animo transmigrasi sebanyak 673 KK. Untuk penempatan transmigran tahun 2023, ada 7 KK yang ditempatkan melalui pola *sharing* yaitu Pusat yang akan memperbaiki rumah untuk calon transmigran dan jaminan hidup (pangan) di daerah tujuan transmigrasi (Lamandau), dan provinsi pengirim yang menyediakan transportasi dengan pesawat udara.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

- a. Masih banyak perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak. Dari 39.000 perusahaan, perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah sebanyak 35.518 perusahaan atau 91,07% (Data Disnakertrans Prov.Jateng per September 2024). Sehingga masih 3.482 perusahaan yang belum menerapkan tata kelola kerja yang layak.
- b. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial, masih tingginya perselisihan penempatan tenaga kerja dan kasus pekerja migran.
- c. Terjadinya peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Data PHK sebanyak 8.232 orang dan yang dirumahkan sebanyak 3.719 orang, sehingga jumlah keseluruhan 11.950 orang (sumber data Disnakertrans Prov.Jateng Agustus 2024).
- d. Adanya demo atau aksi unjuk rasa dari SP/SB terkait dengan penetapan upah minimum.
- e. Permasalahan hubungan industrial dan jaminan sosial tidak termonitor dengan baik.
- f. Kurangnya pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan. Dari 4.032 perusahaan, yang membentuk LKS Bipartit sebanyak 1.910 perusahaan (Data awal tahun 2024).
- g. Pada penetapan UMP dan UMK, sesuai formula perhitungan pada UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, atau sesuai formula pada regulasi baru yang saat ini belum ditetapkan yang akan menghasilkan nominal kenaikan upah yang diterima oleh SP/SB tetapi ditolak oleh pihak pengusaha maupun sebaliknya.
- h. Terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, sebagai tindak lanjut dari PP.78/2015 tentang Pengupahan yang terkait dengan standar struktur dan skala upah.

- i. Banyak mediator di kabupaten/kota yang dipindahtugaskan di luar Bidang Hubungan Industrial dan Jaminasn Sosial.
 - j. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid di kabupaten/kota.
4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Masih tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan belum terlaksananya standarisasi K3 di tempat kerja. Adanya berbagai faktor bahaya antara lain lalu lintas, jalan raya, faktor fisika, faktor kimia, faktor lingkungan kerja dan faktor kecelakaan kerja di perusahaan. Adanya sumber-sumber produksi di tempat kerja yang menerapkan K3 dan belum diterapkannya budaya K3 oleh masyarakat.
- b. Kurangnya pegawai pengawas KK baik pegawai pengawas KK umum maupun spesialis. Jumlah pegawai pengawas se-Jawa Tengah sebanyak 143 orang (Agustus 2024), tidak sebanding dengan jumlah perusahaan.
- c. Masih tingginya pekerja anak di Jateng yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota jumlah anak (10-17 th) yang bekerja tercatat sebanyak 30.830 di tahun 2016 (dasar data PPLS 2011) dan berdasarkan data BPS, Agustus 2023 yaitu jumlah anak (10-17 th) yang bekerja di Jateng sebanyak 320.267 orang.
- d. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan di sektor formal maupun informal. Hal ini ditunjukkan belum sepenuhnya hak normatif tenaga kerja perempuan dilaksanakan. Pembinaan perusahaan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi perempuan di tempat kerja (EEO), target perusahaan yang dibina di tahun 2024 sebanyak 30 perusahaan. Dari 25 perusahaan yang telah selesai dilakukan pembinaan, menunjukkan hasil bahwa tidak ada diskriminasi di tempat kerja, sedangkan 5 perusahaan belum dilakukan pembinaan.

Target pemeriksaan perusahaan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2024 sebanyak 925 perusahaan, dan telah dilaksanakan pemeriksaan pada 720 perusahaan (Triwulan III 2024). Hasilnya terdapat temuan pada 2 perusahaan terkait hak normatif perempuan. 1 perusahaan terkait cuti tahunan, cuti tahunan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan. 1 perusahaan yang lain terkait cuti melahirkan, hak cuti melahirkan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan.
- e. Belum adanya peraturan/regulasi yang mengatur perlindungan pekerja perempuan di sektor informal.
- f. Masih lemahnya kebijakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri dan kurangnya koordinasi kelembagaan penempatan TKI.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan

terhadap capaian nasional/internasional bahwa kinerja pelayanan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading* dalam penurunan jumlah pengangguran di Jawa Tengah harus didukung dari seluruh OPD pemangku kepentingan, harus bekerja sama dan bersinergi dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran di Jawa Tengah dan akan mewujudkan pekerjaan yang layak (*decent work*) bagi masyarakat dengan memberikan dan memfasilitasi masyarakat terhadap kebutuhan pelatihan bagi pencari kerja supaya berkompeten, memberikan akses untuk mencari pekerjaan/penyediaan lapangan kerja, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja serta pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang dampaknya akan menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Disamping itu dalam pengembangan program transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan daerah wilayah terdepan dan tertinggal di wilayah perbatasan sebagai perwujudan satu kesatuan dari negara kesatuan Indonesia dan keadilan dalam menikmati hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengembangan Pembangunan dan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memiliki tantangan dan peluang. **Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan dengan membagi ke dalam bidang pelayanan yang diberikan, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:**

1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

- a. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh perusahaan/pelaku usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja.
- b. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil/kompetensi sesuai dengan keahlian sektor perusahaan/industri serta pelatihan kerja yang dilaksanakan belum mengacu pada kebutuhan pasar/pengguna tenaga kerja.
- c. Produktivitas sangat diharapkan di perusahaan baik produksi maupun jasa namun masih rendah dan minimnya penerapan produktivitas dalam dunia kerja.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

- a. Perpres No.68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, bab membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi guna melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.
- b. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor:400/76 tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2023-2026. Dalam rangka revitalisasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi guna peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Jawa Tengah dan adanya

langkah strategis oleh pemangku kepentingan sesuai ketentuan Pasal 22 (ayat 2).

- c. Perpres No.1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) akan mendorong terbentuknya LPD (Lembaga Produktivitas Daerah) yang dibentuk oleh Gubernur untuk lebih meningkatkan gerakan produktivitas di daerah.

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

- a. Jumlah Pengangguran di Jawa Tengah masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
- b. Jumlah TKA yang dipekerjakan masih relatif banyak sehingga masih diperlukan mekanisme pengendalian.
- c. Perlu peningkatan dan penyebarluasan akses informasi tentang peluang kerja dalam dan luar negeri agar secara cepat dan mudah diketahui oleh masyarakat.
- d. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pencari kerja untuk bisa mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

- a. Peluang kesempatan kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan adanya kebijakan pemerintah mengenai KUR guna pengembangan kewirausahaan/UMKM.
- b. UU Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, memberikan perlindungan pada pekerja migran dari sejak berangkat dan di negara tujuan dan sampai kembali ke Indonesia. Hal ini memberikan peluang kesempatan kerja yang berkeadilan dengan memberikan perlindungan yang optimal pada Pekerja Migran Indonesia.
- c. Perpres No.57 Tahun 2023 tentang Wajib Laporkan Lowongan Ketenagakerjaan, bahwa pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan dan/atau pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tantangan pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

- a. Di Jawa Tengah masih terdapat 17.241 perusahaan yang belum mempunyai peraturan perusahaan sehingga perlu untuk meningkatkan kesadaran pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan.
- b. Terbitnya Permenaker No.1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, sebagai tindak lanjut dari PP No.78 Tahun 2015 tentang Struktur Upah dan Skala Upah.

Peluang pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

- a. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta aktif Jamsostek sebanyak 33.094 perusahaan. Masih terdapat peluang sebanyak 9.364 perusahaan dan 92.797 tenaga kerja yang belum menjadi peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Jumlah perusahaan di Jawa Tengah yang wajib membuat LKS Bipartit berjumlah 6.641 perusahaan, sedangkan yang sudah membentuk LKS Bipartit sebanyak 2.178 perusahaan. Jadi masih ada peluang sebanyak 4.463 perusahaan.
- c. Rata-rata UMK di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.288.331,06 sudah melebihi target UMP sebesar Rp. 2.036.947,00 atau sebesar 89,01 %, oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diperlukan penerapan Struktur Upah dan Skala Upah di perusahaan.

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Masih tingginya angka kecelakaan kerja.
- b. Masih rendahnya perlindungan norma kerja.
- c. Masih rendahnya perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Masih rendahnya kepatuhan norma ketenagakerjaan.
- e. Beralihnya pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender (ARG).
- b. Adanya regulasi terkait pelaksanaan peraturan di bidang norma ketenagakerjaan bagi pengusaha atau pemberi kerja.
- c. Adanya program nasional dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengawasaan norma kerja perempuan dan anak yaitu pengurangan pekerja anak/anak yang bekerja yang dikembalikan ke dunia pendidikan dengan penarikan pekerja anak dikembalikan ke dunia sekolah.
- d. Adanya standarisasi dan sertifikasi K3 di tempat kerja bagi perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan yang memenuhi standar K3.
- e. Adanya aplikasi SIKATIGA, aplikasi SIP2K3 dan aplikasi SILADU diantaranya untuk mempermudah, mempercepat penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pengaduan kasus ketenagakerjaan dan juga untuk menghapuskan gratifikasi dalam pelayanan ketenagakerjaan (pelayanan pengaduan dan penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pembinaan norma ketenagakerjaan, pelayanan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, pelayanan pemeriksaan dan

pengujian objek K3, pelayanan penerbitan produk pelayanan K3, pelayanan WLKP/Wajib Laporkan Ketentagakerjaan, pelayanan penetapan kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, perhitungan klaim jaminan kecelakaan kerja, dan pelayanan penyidikan tindak pidana ketentagakerjaan).

- f. Penggunaan aplikasi Norma100 dari Kemnaker mendukung kegiatan dan capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan ketentagakerjaan, yang merupakan salah satu solusi meningkatkan cakupan perusahaan yang diperiksa oleh pegawai pengawas ketentagakerjaan melalui *self assessment* terhadap pemenuhan norma ketentagakerjaan oleh perusahaan.

Adapun formulasi dari isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu tahun 2025.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang memuat program dan/atau kegiatan dan setelah mengidentifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD kemudian dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang direncanakan yaitu tahun 2025. Jumlah pagu indikatif Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 107.244.690.000,00. Setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan yang direncanakan pada tahun 2025, maka pagu indikatif menjadi sebesar Rp. 99.455.101.000,00 yang terdiri dari beberapa program sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00, program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Program (Sekretariat). Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025, pagu indikatif menjadi Rp. 246.740.000,00.

- b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.946.979.000,00, program ini dilaksanakan oleh Bidang Pentatrans (Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025, pagu indikatif menjadi Rp. 2.319.000.000,00.

- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.126.410.000,00, program ini dilaksanakan oleh Bidang Lattas (Pelatihan dan Produktivitas) dan 4 UPTD/BLK di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, yaitu BLK Cilacap, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi, BLK Semarang 1, BLK Semarang 2. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025, pagu indikatif menjadi Rp. 3.664.754.000,00.

- d. Program Hubungan Industrial

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.348.152.000,00, program ini dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial Jaminan Sosial dan 1 UPTD (BP3TK Provinsi Jawa Tengah). Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025, pagu indikatif menjadi Rp. 1.908.787.000,00.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.076.629.000,00, program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan 1 UPTD (Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah) ditambah 6 Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025, pagu indikatif menjadi Rp. 3.500.000.000,00.

f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 296.000.000,00. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025, pagu indikatif menjadi Rp. 261.000.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pentatrans (Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk penempatan transmigran dan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi melakukan pelatihan bagi calon transmigran.

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 93.150.520.000,00. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025, pagu indikatif menjadi Rp. 87.554.820.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas dan 6 UPTD/Balai di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00 %	91.505.981	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00 %	86.851.560
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100,00 %	1.644.539			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100,00 %	703.260
2	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jawa Tengah	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,67 %	1.122.329	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jawa Tengah	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,67 %	700.000
			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,59 %	1.954.300			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,59 %	2.800.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	30,59 %	992.089	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	30,59 %	176.875
			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	3,20 %	619.525			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	3,20 %	541.325
			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,98 %	778.504			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,98 %	800.000
			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat	9,50 %	213.349			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat	9,50 %	373.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian					pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian		
			Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,35 %	791.250			Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,35 %	623.125
			Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,60 %	649.077			Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,60 %	200.000
			Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	13,22 %	1.082.616			Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	13,22 %	950.429
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	68,57 %	300.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	68,57 %	246.740
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	71,05 %	210.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	71,05 %	526.500

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,30 %	2.736.979			Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,30 %	1.792.500
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jawa Tengah	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3,71 %	76.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jawa Tengah	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3,71 %	30.000
			Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,71 %	220.000			Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,71 %	231.000
7	Program Hubungan Industrial	Jawa Tengah	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,20 %	343.609	Program Hubungan Industrial	Jawa Tengah	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,20 %	349.824
			Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,77 %	1.052.976			Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,77 %	793.936
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,69 %	515.543			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,69 %	308.787

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	45,54 %	436.024			Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	45,54 %	456.240

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat, yaitu untuk menjaring kegiatan aspirasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, pemerintah kabupaten/kota maupun hasil pengumpulan informasi sendiri terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun 2025.

Usulan program/kegiatan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang bersumber dana APBN Tahun 2025 merupakan usulan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, untuk kemudian disampaikan ke Kementerian terkait yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Usulan dari pemerintah kabupaten/kota disertai Kerangka Acuan Kinerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi usulan-usulan dari pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya disampaikan ke Kementerian terkait. Usulan tersebut harus ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Usulan program/kegiatan APBN 2025 dari 35 kabupaten/kota sebesar Rp. 42.512.772.700,00 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI (BIDANG LATTAS)			20.342.677.000	
1.1	Pemagangan Binalavottas	Jawa Tengah		2.329.083.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
1.2	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jawa Tengah		407.240.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
1.3	Pelatihan PBK BLK Cilacap	Jawa Tengah		1.616.198.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - BLK Cilacap
1.4	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Jawa Tengah		118.030.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - BLK Semarang 2
1.5	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Jawa Tengah		117.270.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - BLK Semarang 2
1.6	Pelatihan PBK 15 paket dan Taylor Made Training 1 paket @16 orang	Jawa Tengah		1.179.362.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - BPK Transmigrasi
1.7	Pelatihan PBK 10 paket dan Taylor Made Training 1 paket @16 orang	Jawa Tengah		918.582.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - BLK Semarang 1
1.8	Sarana Pelatihan berupa Peralatan "Pelatihan Gambar Bangunan"	Kebumen		562.625.000	Dinas Tenga Kerja Kabupaten Kebuman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.9	Sarana Pelatihan berupa Peralatan "Pelatihan Sistem Pendingin & Tata Udara"	Kebumen		316.875.000	Dinas Tenga Kerja Kabupaten Kebuman
1.10	Sarana Pelatihan berupa Peralatan "Pelatihan Pembangkit Listrik Tenaga Surya"	Kebumen		226.588.000	Dinas Tenga Kerja Kabupaten Kebuman
1.11	Sarana Pelatihan berupa Peralatan "Pelatihan Teknisi Handphone"	Kebumen		233.720.000	Dinas Tenga Kerja Kabupaten Kebuman
1.12	Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan Produktivitas bagi perusahaan	Kebumen		212.628.000	Dinas Tenga Kerja Kabupaten Kebuman
1.13	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi: - Menjahit - Tataboga - Tata Kecantikann	Demak		1.150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
1.14	Pelatihan Operator Sewing	Batang		702.040.000	Dinas Ketenagakerjaan Kab.Batang
1.15	Pelatihan Las SMAW 2F	Batang		79.204.000	Dinas Ketenagakerjaan Kab.Batang
1.16	Pelatihan Digital Marketing	Batang		165.608.000	Dinas Ketenagakerjaan Kab.Batang
1.17	Pelatihan Practical Office Advance	Batang		82.804.000	Dinas Ketenagakerjaan Kab.Batang
1.18	Bantuan Peralatan Pelatihan -Kejuruan Perhotelan -Kejuruan Otomotif -Kejuruan Processing -Kebutuhan Teknik Listrik dan Pendingin (AC) -Kejuruan Fashion Technology -Kejuruan TIK -Kejuruan Teknik Las -Kejuruan Bisnis Manajemen	Kab.Pekalongan		5.190.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
1.19	Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Menjahit, Otomotif, Las, Tata Boga)	Pemalang		503.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pemalang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.20	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pemalang		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pemalang
1.21	Pelatihan Berbasis Kompetensi -Jahit Upper Alas Kaki -Jahit Garment -Tata Rias Kecantikan -Tata Boga (Pembuatan Roti dan Kue) -Tata Busana (Menjahit Pakaian Dasar Pria dan Wanita) -Digital Marketing	Brebes		1.112.592.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Brebes
1.22	Pengadaan Barang Kegiatan Pelatihan UPT BLK Kota Magelang -Kebutuhan Ruang Instruktur -Kebutuhan Ruang Kelas Menjahit -Kebutuhan Ruang Kelas Komputer -Kebutuhan Ruang Kelas Tata Rias -Kebutuhan Ruang Kelas Menyeluruh	Kota Magelang		495.900.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
1.23	Pengadaan Barang Peralatan Pelatihan di UPTD BLK Kota Semarang -Program Pelatihan Barista -Program Pelatihan Baker -Program Pelatihan Multimedia	Kota Semarang		1.576.656.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
1.24	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi -Pelatihan Teknik Pendingin (Service AC) -Pelatihan Garmen	Kendal		756.204.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Kendal
1.25	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil -Pelatihan Peningkatan Produktivitas-Pelatihan GMP dan HACCP	Kendal		190.468.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Kendal
2	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (BIDANG PENTA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA)			10.851.359.900	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri	Jawa Tengah		619.260.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
2.2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	Jawa Tengah		75.462.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
2.3	Bimtek Petugas Antar Kerja	Jawa Tengah		97.970.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
2.4	Laporan Dukungan Manajemen Internal	Jawa Tengah		164.648.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
2.5	Pelatihan Kewirausahaan "Desain Grafis Muda"	Boyolali		98.567.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.Boyolali
2.6	Pelatihan Kewirausahaan "Service Sepeda Motor Injeksi"	Boyolali		107.561.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.Boyolali
2.7	Pelatihan Kewirausahaan "Menjahit Pakaian Wanita Dewasa"	Boyolali		105.400.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.Boyolali
2.8	Pelatihan Kewirausahaan "Pembuatan Roti dan Kue"	Boyolali		71.050.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.Boyolali
2.9	Pelatihan Kewirausahaan "Pengoperasian Mesin Bubut"	Boyolali		120.600.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.Boyolali
2.10	Pelatihan Kewirausahaan "Fillet Welder SMAW 2F (Las Listrik)"	Boyolali		86.100.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.Boyolali
2.11	Sosialisasi, Seminar Pelatihan dan Belanja Jasa Kantor Lainnya	Boyolali		31.210.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.Boyolali
2.12	Kegiatan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri	Wonogiri		1.250.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
2.13	Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Penyandang Disabilitas dan Lansia)	Wonogiri		209.400.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
2.14	Kegiatan Padat Karya Infrastruktur	Kec.Jatisrono, Kec.Pracimantoro - Wonogiri		320.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
2.15	Kegiatan Padat Karya Produktif	Kec.Eromoko, Kec.Manyaran - Wonogiri		350.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16	Kegiatan Job Fair Daerah	Kec.Sidoharjo - Wonogiri		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
2.17	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tenaga Kerja Mandiri	Blora		132.390.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
2.18	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Produktif	Blora		210.050.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
2.19	Kegiatan Job Fair Daerah	Blora		115.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
2.20	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Job Fair/Bursa Kerja)	Demak		195.090.400	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
2.21	Pelayana Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (Pemagangan Dalam Negeri)	Demak		162.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
2.22	Pelatihan Kuliner Kreatif	Temanggung		89.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
2.23	Pelatihan Digital Marketing	Temanggung		89.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
2.24	Pelatihan bagi PMI Purna (Baking dan Barbershop)	Temanggung		200.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
2.25	Pelatihan Menjahit bagi Penyandang Disabilitas	Temanggung		129.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
2.26	Pelatihan Eco Print bagi Penyandang Disabilitas	Temanggung		91.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
2.27	Pelatihan Tour Guide & Hospitality	Temanggung		109.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
2.28	Pelatihan Kaizen	Temanggung		35.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.29	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan HRD Perusahaan	Temanggung		300.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
2.30	Administrasi Kegiatan Pelatihan	Kab.Pekalongan		70.490.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
2.31	Pelatihan Padat Karya Infrastruktur	Kab.Pekalongan		567.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
2.32	Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Kab.Pekalongan		900.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
2.33	Pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab.Pekalongan		122.030.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
2.34	Perluasan Kesempatan Kerja (Pelatihan Berbasis Kewirausahaan)	Pemalang		255.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pemalang
2.35	Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur)	Pemalang		220.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pemalang
2.36	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pemalang		150.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pemalang
2.37	Pemberdayaan Melalui Kegiatan Padat Karya Infrastruktur	Kab.Semarang		724.760.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Semarang
2.38	Penciptaan Wirausaha Muda Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Kab.Semarang		618.900.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Semarang
2.39	Pameran Kesempatan Kerja Untuk Percepatan Penempatan Kerja (Bursa Kerja/Job Fair)	Kab.Semarang		195.800.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Semarang
2.40	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota -Pembentukan Wirausaha Baru "Barbershop" -Pembentukan Wirausaha Baru "Craft dan Ekonomi Kreatif"	Kendal		233.112.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Kendal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.41	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal -Padat Karya Infrastruktur Rp 513.157.000 -Administrasi Kegiatan Rp 68.200.000	Banjarnegara		581.357.500	Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP Kab.Banjarnegara
2.42	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) -Sosialisasi dan Penempatan	Kab.Magelang		95.226.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Magelang
2.43	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota -Pelatihan Tata Boga/Kuliner -Pelatihan Cukur Rambut Pria/Barbershop -Pelatihan Digital Marketing -Pelatihan Tata Kecantikan Rambut	Kab.Magelang		452.426.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Magelang
3	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (BIDANG HI)			1.319.979.800	
3.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a.Edukasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan Swasta	Jawa Tengah		129.470.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
3.2	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan a. Fasilitasi dan pembinaan Badan usaha b. Perusahaan besar dan menengah yang mendapatkan pemahaman Tata Cara pengesahan ePP	Jawa Tengah		194.034.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
3.3	Peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja a. Pelaku Hubungan Industrial yang mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial (Bimbingan Teknis jaminan Sosial bagi pemberi Kerja dan penerima Upah)	Jawa Tengah		96.413.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.4	Program Dukungan Manajemen a. Layanan Data dan informasi b. Administrasi kegiatan untuk Provinsi c. Sinergitas Pendataan Provinsi dan kab/kota (Provinsi dan Kab/Kota) d. Efektivitas Pelaporan e. Konsultasi Teknis/Rakor Sinkronisasi	Jawa Tengah		251.901.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
3.5	Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Kebumen	Kebumen		12.934.000	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
3.6	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota (May Day dan Tripartit)	Demak		195.005.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
3.7	Bimbingan Pembuatan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama dan LKS Bipartit	Kab.Pekalongan		97.800.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
3.8	Penyuluhan/Pembinaan Hubungan Industrial	Kab.Pekalongan		19.600.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
3.9	Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Kab.Pekalongan		70.350.000	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Pekalongan
3.10	Bimbingan Teknis Pengupahan Berbasis Produktivitas	Kendal		101.796.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Kendal
3.11	Workshop Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Batang		80.016.200	Dinas Ketenagakerjaan Kab.Batang
3.12	Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Batang	Batang		70.660.600	Dinas Ketenagakerjaan Kab.Batang
4	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (BIDANG WASNAKER)			1.272.293.000	
4.1	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Jawa Tengah		928.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.2	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Jawa Tengah		189.630.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
4.3	Pengujian keselamatan dan kesehatan Kerja	Jawa Tengah		39.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
4.4	Program Dukungan Manajemen	Jawa Tengah		115.663.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
5	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PERDESAAN DAN TRANSMIGRASI			2.299.463.000	
5.1	Perpindahan dan penempatan transmigrasi	Jawa Tengah		1.655.506.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
5.2	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota: Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Blora		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
5.3	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota: Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Blora		200.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
5.4	Pengembangan Kawasan Transmigrasi: Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian (Transmigrasi)	Demak		193.957.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
5.5	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Pemalang		150.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pemalang
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.427.000.000	
6.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.427.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati
JUMLAH BESARAN/VOLUME (Rp)				42.512.772.700	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Ketenagakerjaan

Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan:

a. Visi

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

b. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah:

- 1) peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 tersebut yaitu:

- 1) memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

- 2) menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
- 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

c. Tujuan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- 1) mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- 2) mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- 3) meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- 4) meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang;
- 5) mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- 6) mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- 7) mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

d. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni:

- 1) Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.

Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Produktivitas Tenaga Kerja.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama ini didukung sejumlah indikator kinerja program sebagai berikut:

- Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan.
- Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya.
- Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri.
- Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
- Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA.

- Jumlah pekerja pada perusahaan yang menetapkan Norma Ketenagakerjaan yang fundamental.
 - Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi Norma K3.
 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja dan hygiene perusahaan.
 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial.
- 2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dan Indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung oleh indikator kinerja program sebagai berikut, yaitu:
- Indeks dan Nilai Evaluasi PMPRB.
 - Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
 - Nilai evaluasi SAKIP.
 - Nilai kinerja mitra kerja pengawasan internal.
 - Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah (termasuk *whistle blowing system*).

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

a. Visi

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tahun 2020 - 2024 adalah:

“Terwujudnya Pedesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”

b. Misi

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024 adalah:

- 1) Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;

- 2) Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- 3) Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 4) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
- 5) Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;
- 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- 7) Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020 - 2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sebagai berikut:

- 1) Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
- 2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- 3) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
- 4) Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 5) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 6) Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2020 - 2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu:

- 1) Berkembangnya status pembangunan desa;
- 2) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan;
- 3) Menurunnya kemiskinan di perdesaan;
- 4) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
- 5) Terervitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma);
- 6) Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi;
- 7) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
- 8) Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal;
- 9) Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal;

- 10) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi;
- 11) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 12) Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 13) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi;
- 14) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”, dengan prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, sesuai tugas dan fungsi yang diampu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah maka dilaksanakan program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- d. Program Hubungan Industrial
- e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

3.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah : **“Meningkatnya Pengurangan Pengangguran”** dan **“Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah”**.

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja daerah.
2. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan kerja).
6. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah.

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Disnakertrans Prov.Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengurangan pengangguran		Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,64
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	68,57
		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rp	56,50
			Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10,15
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,06

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	91,58
		Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,96
2.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	91
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,20
		Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Resiko (MRI) Perangkat Daerah	Angka	3,02

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat	10	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparatur pegawai di daerah (Kab/Kota/Prov) dalam menyusun dokumen RTKD - Melakukan reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah tiap tahun - Untuk menilai keakurasian hasil perkiraan 6 indikator dalam RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS pada tiap tahunnya - Menyampaikan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					- masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing .	hasil analisis untuk bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja - Meningkatkan pemanfaatan dokumen RTKD bagi SKPD terkait yang menyusun renstra dan renja OPD mengacu pada dokumen RTKD		
Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah.	10	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan	- Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Produktivitas di Perusahaan	tenaga kerja tidak naik secara signifikan	baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan - Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja		
Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	10	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan	- Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi - Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>khususnya dari luar negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb. 	<p>ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri 			
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemberdayaan masyarakat kurang tepat sasaran	10	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertrans Jateng	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal	- Penyuluhan di masyarakat tentang peluang kerja di sektor informal - Kolaborasi dan Kerjasama lintas sektor dengan stakeholder terkait dalam	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor informal		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	10	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja	Pencari kerja tidak sesuai dengan harapan/keinginan	Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan, pembekalan, pengembangan aplikasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Calon transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	10	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama, calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya	Sosialisasi, koordinasi dengan Pusat dan Daerah Kab/Kota	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	6 bulan setiap tahun
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar	Gratifikasi pada pengesahan PP dan pendaftaran PKB	10	Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tidak sesuai dengan ketentuan	Ketidakpercayaan Publik pada Disnakertrans	Peningkatan integritas pegawai khususnya Mediator Hubungan Industrial di Bidang HI Jamsos dan BP3TK	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	peserta BPJS ketenagakerjaan)							
Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Pemalsuan dokumen Surat Keterangan Layak K3 oleh a. Perusahaan pemilik alat K3 (Obyek K3) b. Pihak Penguji Independen (PJK3) dan dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan	10	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan atau perusahaan pemilik obyek K3 ingin segera mendapat Surat keterangan Layak K3 untuk mengikuti tender /proyek.	- Keselamatan tenaga kerja di perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan integritasnya	- Konfirmasi kepada admin Aplikasi SIKATIGA untuk validasi nomor Surat Keterangan K3 yang ada di Perusahaan. - Mengusulkan kepada Kemnaker untuk menghentikan kegiatan operasional PJK3 yang melakukan pemalsuan dokumen Surat keterangan Layak K3 di wilayah Jawa Tengah.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember (setiap tahun)

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Adanya potensi gratifikasi dalam pengurusan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SK P2K3) apabila dilakukan dengan tatap muka.	10	- Perusahaan ingin cepat mendapatkan SK P2K3 tersebut. - Ucapan terima kasih dari perusahaan yang mengurus SK P2K3 yang diwujudkan dalam bentuk barang/ makanan/ uang dsb	- Integritas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dipertanyakan konsistensinya - Menambah biaya bagi perusahaan yang mengurus SK P2K3	Menggunakan aplikasi pengurusan SK P2K3 secara Online (SI-P2K3 Jateng) untuk meniadakan tatap muka dalam pengurusan SK P2K3	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Tujuan dan Sasaran /Program/ Kegiatan OPD (Disnakertrans Prov. Jateng) tidak mencapai target.	10	- Kurangnya pemahaman pegawai Disnakertrans Jateng terhadap Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan, Sub kegiatan beserta indikator kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan Resiko oleh OPD (Disnakertrans Jateng). Dan tidak	Banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang muncul sedangkan pembiayaan terbatas. Dan permasalahan ketenagakerjaan tidak semuanya bisa ditangani oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sendiri saja, tanpa	- Pegawai diberikan pemahaman mengenai pengelolaan risiko di unit kerja masing-masing identifikasi risiko - Peningkatan pemahaman pegawai terhadap resiko yang dimungkinkan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				memahami perencanaan dan Penganggaran serta mekanismenya, baik itu Renstra OPD dan Renja OPD - Kurang pahamnya pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan kegiatan) - Kurang cermatnya dalam pelaporan kegiatan baik kinerja dan anggaran	kerjasama dengan stakeholder terkait atau pun OPD pengampu sektoral lainnya	terjadi		
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Masih ada Pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari Disnakertrans Prov. Jateng	10	- Penerapan SOP yang belum optimal - Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap keterbukaan Informasi Publik masih belum merata	- Pelayanan pada masyarakat kurang optimal - Kurangnya Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap jenis pelayanan yang ada di OPD - Lambatnya pelayanan yang	- Memberikan pemahaman melalui Sosialisasi / pelatihan/ bimtek, media informasi kepada pegawai Disnakertrans tentang jenis pelayanan yang diberikan oleh	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					diberikan masyarakat karena penerapan SOP yang belum optimal	Disnakertrans Jateng termasuk informasi yang dikecualikan - Mengharuskan petugas pelayanan informasi untuk bekerja sesuai dengan SOP		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang selengkapnya rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 serta perkiraan maju tahun 2026 seperti tertuang dalam rumusan dibawah ini:

Rumusan program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan RKPD yang ditetapkan.

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah													87.181.0 82.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	91		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya											86.477.8 22.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												Tar get	Rp			
												(13)	(14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		kualitas pelayanan perangkat daerah														
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	85,2	86.477.822.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								86.477.822.000			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawain,					%	100	1.397.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						dan keuangan perangkat daerah									
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						57.600.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	1	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.600.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						169.920.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	169.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.560.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.360.000		
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	10.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1 .07.0011					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
										Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						752.030.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjan			Laporan	1	752.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								g urusan pemerintahan daerah yang disusun								
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.030.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	149.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				598.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	598.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						397.450.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	8	397.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								aan							
				X.XX.01.1 .09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09.0007					Pemeliharaan Aset Tetap				70.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Lainnya				00		
										Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.450.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	32.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	741.213.000		
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.800.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	34.800.000		
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000		
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	1	7.000.000		
				X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	7.000.000		
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						78.861.000		
								Persentase layanan administrasi			%	100	78.861.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								asi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan							
				X.XX.01.1 .06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000		
				X.XX.01.1 .06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.101.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	Paket	1	1.101.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										disediakan					
				X.XX.01.1 .06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000		
				X.XX.01.1 .06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	14.000.000		
				X.XX.01.1 .06.0007					Penyediaan Bahan/Material				11.700.000		
										Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	11.700.000		
				X.XX.01.1 .06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.300.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	5.300.000		
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.760.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	42.760.000		
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						496.508.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah			Laporan	1	496.508.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								ahan daerah yang disusun							
				X.XX.01.1 .08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000		
				X.XX.01.1 .08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	70.000.000		
				X.XX.01.1 .08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				423.508.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	Laporan	12	423.508.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										disediakan					
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						124.044.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	124.044.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1 .09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
										Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	6	35.000.000		
				X.XX.01.1 .09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1 .09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.044.000		
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	39.044.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat					%	100	1.000.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						at daerah										
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						45.000.000			
							Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				Dokumen	1	45.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000			
									Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Dokumen	1	45.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										disediakan					
				X.XX.01.1 .06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0007					Penyediaan Bahan/Material				2.500.000		
										Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						933.400.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan			Laporan	1	933.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								pemerintahan daerah yang disusun								
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273.026.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	273.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				660.374.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	660.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik					1.600.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	4	1.600.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				1.600.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Operasional atau Lapangan						
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	849.571.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.800.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	1	34.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000			
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							67.811.000		
								Persentase layanan administratif			%	100	67.811.000		SUB BAGIAN TATA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								asi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan							USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.165.000			
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	7.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.845.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	4.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.800.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0007					Penyediaan Bahan/Material				9.796.000		
										Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	12	9.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.085.000		
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	4.085.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				37.120.0		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									dan Konsultasi SKPD				00		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	37.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						702.228.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	27	702.228.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1					Penyediaan Jasa				1.500.00		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				.08.0001					Surat Menyurat				0		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				211.200.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	211.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				489.528.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	489.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09			Pemeliharaan Barang Milik						44.732.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	12	44.732.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				25.087.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Operasional atau Lapangan						
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	25.087.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.645.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11	15.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09.0007					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		
										Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat					%	100	1.350.000.000	Balai Keselamatan Kerja	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah									Kelas A	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							44.500.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	24	44.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi					42.100.0		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Pelaksanaan Tugas ASN				00		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				2.400.000		
										Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	1	18.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000			
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						111.200.000			
								Persentase layanan administrasi			%	100	111.200.000		SUB BAGIAN TATA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								asi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan							USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.000.000			
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	13.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.100.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	5.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.340.000		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	13.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.450.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	12	6.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										yang disediakan					
				X.XX.01.1 .06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.310.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	63.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan			Unit	5	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								pemerintah daerah yang disediakan							
				X.XX.01.1.07.0002					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000		
										Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						619.250.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan			Laporan	36	619.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								pemerintahan daerah yang disusun								
				X.XX.01.1 .08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.862.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.862.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1 .08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.900.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	202.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1 .08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				408.488.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	408.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207.050.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	11	207.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								aan							
				X.XX.01.1 .09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.300.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	116.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09.0008					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
										Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1 .09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.750.000		
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	80.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat					%	100	79.331.363.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						at daerah									
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						70.261.189.000		
							Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				Dokumen	1	70.261.189.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				69.218.861.000		
										Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	450	69.218.861.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1 .02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				776.620.000		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	776.620.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1 .02.0003					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				194.266.000		
										Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	194.266.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1 .02.0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan				71.442.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Keuangan Akhir Tahun SKPD						
										Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	71.442.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik			Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								daerah pada perangkat daerah							
				X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	11	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						44.220.000		
								Jumlah jenis laporan pelaksanaan			Laporan	12	44.220.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah								
				X.XX.01.1.04.0007					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				44.220.000			
										Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	44.220.000		SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						102.220.000			
								Persentase layanan administrasi kepegawa			%	100	102.220.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								ian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan							AIAN	
				X.XX.01.1 .05.0005					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				36.300.000			
										Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12	36.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
				X.XX.01.1 .05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000			
										Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
										yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0010					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22.000.000			
										Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100	22.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0011					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				33.920.000			
										Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	33.920.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.899.312.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	2.899.312.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										disediakan					
				X.XX.01.1 .06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.780.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	135.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang	Paket	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
										disediakan					DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				73.240.000			
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	73.240.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000			
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				41.562.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	41.562.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.713.730.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.713.730.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				600.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						236.713.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Unit	8	236.713.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								yang disediakan								
				X.XX.01.1 .07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				206.713.000			
										Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	206.713.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
				X.XX.01.1 .07.0008					Pengadaan Aset Tak Berwujud				30.000.000			
										Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
				X.XX.01.1 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.399.915.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	4.399.915.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.765.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	21.765.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.183.350.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	Laporan	12	1.183.350.000	SUB BAGIAN UMUM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
										sumber daya air dan listrik yang disediakan					DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .08.0003					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177.800.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	177.800.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.017.000.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3.017.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1 .09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.337.794.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	1.337.794.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				440.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Lapangan						
										Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	20	440.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0005					Pemeliharaan Mebel				42.000.000		
										Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				122.600.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	122.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0008					Pemeliharaan Aset Tak				85.600.0		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Berwujud				00		
										Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	85.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				488.804.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	488.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.740.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	91.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.050.000		
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum,					%	100	1.808.675.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah									
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.000.000		
								Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah			Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						355.305.000		
							Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan				%	100	355.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.700.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	38.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				990.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.273.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	11.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.585.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	2.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0007					Penyediaan Bahan/Material				25.881.000		
										Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	2	25.881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.780.000		
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	6.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				227.096.		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									dan Konsultasi SKPD				000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	227.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						86.875.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang			Unit	1	86.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								disediakan							
				X.XX.01.1.07.0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				86.875.000		
										Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	86.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.041.900.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjan			Laporan	1	1.041.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								g urusan pemerintahan daerah yang disusun								
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				264.000.000			
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	264.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				774.900.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	774.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						270.595.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	270.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								aan							
				X.XX.01.1 .09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.150.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	53.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1 .09.0007					Pemeliharaan Aset Tetap				65.750.0		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Lainnya				00		
										Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	4	65.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.695.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	66.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat											703.260.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		daerah													
			Indeks Manajemen Risiko								Angka	3,02	703.260.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								703.260.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah					%	100	703.260.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggar						703.260.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	5	703.260.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				459.605.000		
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat	Dokumen	10	459.605.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										daerah					
				X.XX.01.1 .01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				243.655.000		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	243.655.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pengurangan Pengangguran													19.400.281.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persentase pengangguran yang ditempatkan										%	28,64		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma											3.500.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												Tar get	Rp			
												(13)	(14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)														
			Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan								%	80,96	3.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								3.500.000.000			
						Persentase peningk					%	26,67	700.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						atan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3									
				2.07.06.1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						700.000.000		
								Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan			Laporan	60	700.000.000		
				2.07.06.1.01.0003					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				700.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									di Perusahaan						
										Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	60	700.000.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan					%	89,59	2.800.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
				2.07.06.1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						2.800.000.000		
								Persentase penanganan			%	56,43	536.000.000	SEKSI PENEGAKAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								an kasus ketenagakerjaan							HUKUM KETENAGAKERJAAN	
				2.07.06.1.01.0002					Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				536.000.000			
										Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	260	536.000.000		SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
								Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja			%	30	723.000.000		SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
				2.07.06.1.01.0003					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				723.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									di Perusahaan						
										Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Unit	581	723.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
								Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan			%	62,21	1.541.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
				2.07.06.1.01.0001					Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				1.541.000.000		
										Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	1190	1.541.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				ATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja											11.164.754.000		
			Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten								%	10,15	8.214.325.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN								8.214.325.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					PRODUKTI VITAS TENAGA KERJA										
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi					%	30,59	176.875.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				2.07.03.1.02			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						176.875.000		
								Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian			%	26,67	176.875.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								akreditasi lembaga							
				2.07.03.1 .02.0001					Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				176.875.000		
										Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Unit	30	176.875.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang					%	3,2	2.116.325.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						industri									
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						2.116.325.000		
								Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi			%	100	9.410.000	SEKSI PEMASARAN	
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan				9.410.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
										Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	100	4.150.000	SEKSI PEMASARAN	
										Jumlah dokumen TNA	Dokumen	10	5.260.000	SEKSI PEMASARAN	
								Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK			%	30	41.325.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.03.1 .01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				41.325.000		
										Jumlah Kesepakatan/nas kah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	2	41.325.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri			%	10,2	1.715.590.000	SEKSI PELATIHAN	
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.715.590.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	296	1.715.590.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja			%	100	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
				2.07.03.1.01.0003					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				350.000.000		
										Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompete					%	46,9801	2.850.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						nsi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran									
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						2.850.000.000		
								Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi			%	33,33	46.005.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								pelatihan berbasis kompetensi							
				2.07.03.1 .01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				46.005.000		
										Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	380	18.160.000	SEKSI PEMASARAN	
										Jumlah dokumen TNA	Dokumen	1	27.845.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CT KI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan			%	0,67	2.413.995.000	SEKSI PELATIHAN	
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan				2.413.995.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Klaster Kompetensi						
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	272	2.413.995.000	SEKSI PELATIHAN	
								Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1			%	20	10.000.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.03.1 .01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				10.000.000		
										Jumlah Kesepakatan/nasakah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI PEMASARAN	
								Persentase peningkatan			%	100	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								an sarana pelatihan kerja							
				2.07.03.1 .01.0003					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				380.000.000		
										Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian					%	9,5	2.448.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						n									
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						2.448.000.000		
								Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi			%	66,67	5.000.000	SEKSI PEMASARAN	
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan				5.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
										Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	200	1.550.000	SEKSI PEMASARAN	
										Jumlah dokumen TNA (Training NeedAssesment)	Dokumen	2	3.450.000	SEKSI PEMASARAN	
								Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans			%	40	8.000.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.03.1 .01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				8.000.000		
										Jumlah Kesepakatan/nasakah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	3	8.000.000	SEKSI PEMASARAN	
								Persentase pengangg			%	64	2.135.000.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								ur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian							
				2.07.03.1 .01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.135.00 0.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	468	2.135.00 0.000	SEKSI PELATIHAN	
								Persentase peningkatan sarana			%	100	300.000. 000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								pelatihan kerja							
				2.07.03.1.01.0003					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				300.000.000		
										Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	99	300.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi					%	2,35	623.125.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						623.125.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya			%	50	623.125.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				518.313.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	200	518.313.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.03.1 .01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				104.812.000		
										Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	5	104.812.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
			Tingkat produktivitas								Juta Rupiah	56,5	2.950.429.000	Dinas Tenaga Kerja dan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			tenaga kerja di Jawa Tengah											Transmigrasi	
				2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								2.950.429.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas					%	4,6	950.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				2.07.03.1.03			Konsultasi Produktivitas pada						950.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Perusahaan Menengah									
								Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas			%	20,67	950.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS		
				2.07.03.1.03.0001					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				950.000.000			
										Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan	Unit	475	950.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Konsultasi / Peningkatan Produktivitas					
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan					%	13,22	2.000.429.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						1.975.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhny			Unit	19	51.665.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												Target	Rp			
												(13)	(14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								a yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.03.1 .01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				51.665.000		
										Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	1	51.665.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan				%	3,42	1.573.335.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.03.1 .01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.573.33 5.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	705	1.573.33 5.000	SEKSI PEMASARAN	
								Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja			%	100	350.000. 000	SEKSI PELATIHAN	
				2.07.03.1 .01.0003					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				350.000. 000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
				2.07.03.1.03			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						19.429.000		
								Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau			%	8	19.429.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								kewirausahaan							
				2.07.03.1.03.0001					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				19.429.000		
										Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Unit	5	19.429.000	SEKSI PELATIHAN	
				2.07.03.1.04			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						6.000.000		
								Persentase pengukuran produktivi			%	4	6.000.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								tas tenaga kerja di perusahaan							
				2.07.03.1.04.0001					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				6.000.000		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	6.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah											246.740.000		
			Persentase kabupaten/kota								%	68,57	246.740.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			yang menyusun rencana tenaga kerja daerah											asi	
				2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								246.740.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					%	68,57	246.740.000	SEKRETARIAT	
				2.07.02.1.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						246.740.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan			%	31,43	246.740.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				2.07.02.1.01.0001					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				80.850.000		
										Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	80.850.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				2.07.02.1.01.0003					Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				77.370.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	35	77.370.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				2.07.02.1.01.0004					Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				88.520.000		
										Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	35	88.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		Meningkatnya penempatan tenaga											2.580.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		kerja dan perluasan kesempatan kerja													
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan								%	71,06	2.580.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								2.319.000.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan					%	71,05	526.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						tkan disektor formal									
				2.07.04.1.02			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						10.000.000		
								Persentase kenaikan izin LPTKS yang diterbitkan			%	20	10.000.000		
				2.07.04.1.02.0002					Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				10.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	4	10.000.000		
				2.07.04.1.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						516.500.000		
								Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja			%	19,41	516.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)								
				2.07.04.1.03.0001					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				116.500.000			
										Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	116.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA		
				2.07.04.1.03.0003					Job Fair /Bursa Kerja				400.000.000			
										Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	400.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal					%	68,3	1.792.500.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				2.07.04.1.01			Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						1.490.153.000		
								Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas			%	57,14	840.191.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Daerah Kab/Kota							
				2.07.04.1 .01.0001					Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				159.581.000		
										Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	70	159.581.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				2.07.04.1 .01.0002					Pelayanan Antar Kerja				601.830.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	80	601.830.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				2.07.04.1 .01.0003					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				19.310.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	19.310.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				2.07.04.1.01.0004					Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				59.470.000		
										Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	50	59.470.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .			%	47,5	649.962.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				2.07.04.1.01.0005					Perluasan Kesempatan Kerja				649.962.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	230	649.962.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				2.07.04.1.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna						289.307.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												Tar get	Rp			
												(13)	(14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Penempatan) di Daerah Provinsi									
								Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal			%	50	229.667.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.04.1 .04.0002					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik				40.200.000		
										Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	15	40.200.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				2.07.04.1 .04.0004					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				189.467.000		
										Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	80	189.467.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
														TAN KERJA	
								Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan			%	1,51	59.640.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				2.07.04.1 .04.0001					Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				50.600.000		
										Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	60	50.600.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
															KERJA	
				2.07.04.1 .04.0003					Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				9.040.000			
										Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	2	9.040.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		
				2.07.04.1 .05			Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu)						13.040.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Daerah Provinsi									
								Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)			%	100	13.040.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.04.1 .05.0001					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				13.040.000		
										Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	150	13.040.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								261.000.000		
						Persentase kenaikan calon					%	3,71	30.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						transmigran dilatih bidang pertanian									asi Kelas A	
				3.32.03.1.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						30.000.000			
								Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan			%	80	30.000.000		SEKSI PELATIHAN	
				3.32.03.1.01.0006					Pelatihan Transmigrasi				30.000.0			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
													00		
										Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	10	30.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi					%	3,71	231.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				3.32.03.1.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah						231.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												Target	Rp			
												(13)	(14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
								Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi			%	8,57	231.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI		
				3.32.03.1 .01.0001					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				231.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	231.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	OPD Provinsi
		Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial											1.908.787.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												Tar get	Rp			
												(13)	(14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)									%	91,58	1.908.787.000		
				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRI									1.908.787.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					AL										
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan					%	98,2	349.824.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				2.07.05.1.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/						349.824.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Kota									
								Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB			%	26,97	349.824.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		
				2.07.05.1.01.0001					Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				125.380.000			
										Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Unit	105	125.380.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		
				2.07.05.1.01.0002					Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang				28.881.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									terkait dengan Hubungan Industrial						
										Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Unit	105	28.881.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				2.07.05.1.01.0003					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				195.563.000		
										Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	Laporan	140	195.563.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek					
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk					%	49,77	793.936.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				2.07.05.1.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang						793.936.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi								
								Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk			%	49,79	521.753.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
				2.07.05.1.02.0001					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah				241.997.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Provinsi						
										Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	30	241.997.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
				2.07.05.1.02.0003					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				26.963.000		
										Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Unit	1000	26.963.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.05.1 .02.0004					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				252.793.000		
										Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Unit	36	252.793.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
								Persentase perusahaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala			%	80	272.183.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								provinsi							
				2.07.05.1 .02.0005					Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				272.183.000		
										Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Unit	50	272.183.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial					%	96,69	308.787.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.05.1.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						308.787.000		
								Persentase perselisihan hubungan industrial			%	96,69	95.422.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan								
				2.07.05.1.02.0002					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				95.422.000			
										Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	125	95.422.000			OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan			%	36	213.365.000		
				2.07.05.1.02.0001					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				213.365.000		
										Jumlah perselisihan yang dicegah	Kasus	222	213.365.000		OPD Provinsi ; DKI JAKAR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												Tar get	Rp			
												(13)	(14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
																TA
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah					%	45,54	456.240.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS		
				2.07.05.1.03			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/						456.240.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2025				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
							Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK)									
								Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota			%	2,16	456.240.000		SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
				2.07.05.1.03.0001					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				278.055.000			
										Jumlah Penetapan UMP	Laporan	1	278.055.000		SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Tar get	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.05.1 .03.0003					Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)						
										Jumlah penetapan UMK	Laporan	1	54.291.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
				2.07.05.1 .03.0005					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				123.894.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	180	123.894.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
JUMLAH															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
													106.581.363.000		

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level program dan kegiatan perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko program dan kegiatan yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1. Kab/Kota masih belum tepat dalam menyusun kebijakan dan indikator yang ditunjukkan dalam membangun ketenagakerjaan 2. Resiko SDM Dinas kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM	10	1. Kab/kota belum menyusun RTKD 2. Kurangnya perusahaan dari SDM yang membidangi ketenagakerjaan kab/kota untuk menyusun RTKD 3. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan SKPD terkait diluar Disnakertrans Kab/kota belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD 4. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan perusahaan tidak mengerti kegunaan/kemanfaatan RTK Mikro di	Dinas Kab/kota tidak tepat dalam pemilihan dan penetapan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD. Sehingga akan menyebabkan ketidaktepatan dalam melakukan intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kabupaten/kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja,	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparatur/ASN/pegawai kab/kota/provinsi dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di masing-masing daerah. - Melakukan review terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun - Menyampaikan laporan nilai keakurasian indikator hasil proyeksi indikator RTKD tersebut dan realisasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Sasaran manfaat/peserta pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/penempa	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		perusahaan banyak yang tidak memahami pentingnya RTK Mikro di perusahaan dan kemannya		<p>perusahaan dalam keberwujudan tenaga kerja di perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan serta bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi adanya redesign budget, redesign program, redesign supply dan demand</p> <p>5. Dinas Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum memanfaatkannya dan digunakan sebagai dasar dalam perancangan serta penganggaran pada dokumen perencanaan baik RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD.</p> <p>6. SDM Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM di perusahaan di kab/kota tidak</p>	Renstra, OPD, dsb).	tan/perindungan dan sebagainya diarahkan sesuai dengan yang dibutuhkan/kebutuhan tenaga kerja yang tercakup dalam dokumen RTKD dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau dapat dilihat dari RTK Mikro di Perusahaan (Yang akan dilaporkan dalam Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan/WLKP).		

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				memahami penyusunan RTK Mikro di perusahaan serta manfaat atau kegunaan terkait pemberdayaan tenaga kerja di perusahaan maupun dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, redesign supply dan demand				
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan / atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, miss match dan sebab	12	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	1. Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2. Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3. Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja	Optimalisasi Program Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi unsur Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dan Perantaraan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lainnya)						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	Pencari Kerja/ Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	12	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta / kelompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat	1. Memperketat seleksi calon peserta baik secara administratif maupun teknis 2. Pendampingan memulai usaha terhadap peserta pemberdayaan sejak awal kegiatan sampai pasca kegiatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan - Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya	Pembinaan : PP/PKB; LKS Bipartit; Struktur dan Skala Upah; kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik / masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	-Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan -Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember 2025

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pekerja/ buruh pada BPJS Ketenagakerjaan - Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/ masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/ buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak	12	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	1. Monitoring hasil penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan 2. Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan	1. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pekerja/buruh; 4. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5. Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja						
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan tidak tepat	10	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - SDM tidak dapat menghitung persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja - SDM tidak dapat	SDM tidak dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja kedepannya seperti apa, sehingga kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan datang, belum bisa mengantisipasi/mitigasi	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparatur pegawai di daerah (Kab/Kota/Prov) dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) - Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				membaca indikator data terkait informasi makro (laju pertumbuhan, PDRB, dsb) - SDM kurang memahami potensi daerah - SDM di daerah bermutasi/bertukar dengan cepat				
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas dimungkinkan tidak sesuai dengan yang diinginkan.	12	Sumber Daya Pelatihan (SDP) antara lain kurikulum, peserta, lokasi/tempat pelatihan serta sarana dan prasarana	-Peserta tidak memahami materi, -Peserta tidak mengikuti pelatihan sampai selesai, - Peserta tidak memahami materi, -Penyelenggara kurang selektif dalam merekrut peserta.	-Melaksanakan Forum Sinergitas Produktivitas -Menentukan persyaratan untuk perekrutan peserta -Monitoring paska kegiatan	Pejabat setingkat eselon 4	Januari-Desember 2025
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja	Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Lintas Kab/Kota Program Penempatan Tenaga Kerja dan	Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja	12 bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja	Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Lintas Kab/Kota Program Penempatan Tenaga Kerja dan	Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja	12 bulan
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase calon pekerja migran Indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	12	1. Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2. Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3. Masih adanya ego sektoral antar stakeholder penempatan PMI 4. Belum optimalnya penyebarluasan	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, perangkat desa, asosiasi lembaga penempatan, asosiasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan, monitoring, penyelesaian permasalahan dan pencegahan penempatan PMI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5. Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural 6. PMI belum siap bekerja ke luar negeri yang rentan permasalahan		unprosedural		
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	12	1. Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2. Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3. Belum optimalnya penyebaran informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan monitoring penggunaan TKA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				daerah 4. Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan				
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Permasalahan terkait Hubungan Industrial dan Jamsos tidak termonitor dengan baik; Pekerja diperlakukan tidak adil; Banyak perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit	12	Data HI tidak Valid dan update; Pekerja dan Pengusaha tidak Memahami Syarat Kerja; Kurangnya pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan (dari 4.032 perusahaan yang wajib membentuk sampai dengan saat ini baru 1.910)	1. Kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tidak tepat 2. Kondisi HI tidak kondusif/ kurang harmonis 3. Mengganggu stabilitas produktivitas perusahaan	1. Monitoring data kinerja HI secara berkala 2. Instruksi ketepatanwaktuan penyampaian data 3. Monitoring data kinerja dan permasalahan HI secara berkala 4. Monitoring data kinerja HI secara berkala	Kepala Bidang HI dan Jamsos	Triwulan IV 2025

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	1. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 2. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja	12	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	1. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 2. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	Melakukan Penanganan kasus Ketenagakerjaan	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 Bulan
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	10	1. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja 2. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	Tingginya Angka Kecelakaan kerja dan/atau penyakit Akibat Kerja	1. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan Norma K3 di tempat kerja 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Objek K3 di tempat kerja. 3. Pembinaan dan Pembentukan P2K3 di Perusahaan	1. Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma K3 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	12	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja	Pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	Terjadinya perselisihan ketenagakerjaan (HI dan Penempatan TK)	12	Rendahnya kesadaran Pengusaha dan pekerja akan pentingnya mentaati Norma Ketenagakerjaan	Rendahnya Perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha	Mediasi kasus ketenagakerjaan(HI dan Penempatan TK)	Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	12 Bulan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah selesai disusun sebagai bagian perwujudan dari RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang diimplementasikan ke dalam RENSTRA Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah mendasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih efektif, efisien dan terpadu. Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan prima bagi semua masyarakat, penyusunan Rencana Kerja ini juga menganut asas pelaksanaan *Good Governance* pada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, dengan diterapkannya prinsip efektif, efisien, transparan, *akuntable*, dan *Rule Of Law*.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat mengantarkan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Rencana Kerja ini merupakan dasar monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh aparatur dapat melaksanakan tugas secara konsisten, kerjasama dan koordinasi, bertanggungjawab yang tinggi serta berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Semarang, November 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



Ahmad Aziz, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19680617 199803 1 007

LAMPIRAN

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat	Risiko Strategis	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing .	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah.	Risiko Strategis	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	Risiko Strategis	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemberdayaan masyarakat kurang tepat sasaran	Risiko Strategis	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertrans Jateng	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal	Pemerintah Daerah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Ke giatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	Risiko Strategis	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja	Pencari kerja tidak sesuai dengan harapan/keinginan	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Calon transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	Risiko Strategis	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama, calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	Risiko Strategis	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	- Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan - Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan - Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik / masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Gratifikasi pada pengesahan PP dan pendaftaran PKB	Risiko Strategis	Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tidak sesuai dengan ketentuan	Ketidakpercayaan Publik pada Disnakertrans	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Pemalsuan dokumen Surat Keterangan Layak K3 oleh a. Perusahaan pemilik alat K3 (Obyek K3) b. Pihak Penguji Independen (PJK3) dan dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan	Risiko Fraud	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan atau perusahaan pemilik obyek K3 ingin segera mendapat Surat keterangan Layak K3 untuk mengikuti tender /proyek.	- Keselamatan tenaga kerja di perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan integritasnya	Pemerintah Daerah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Adanya potensi gratifikasi dalam pengurusan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SK P2K3) apabila dilakukan dengan tatap muka.	Risiko Fraud	- Perusahaan ingin cepat mendapatkan SK P2K3 tersebut. - Ucapan terima kasih dari perusahaan yang mengurus SK P2K3 yang diwujudkan dalam bentuk barang/ makanan/ uang dsb	- Integritas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dipertanyakan konsistensinya - Menambah biaya bagi perusahaan yang mengurus SK P2K3	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
11	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Tujuan dan Sasaran /Program/ Kegiatan OPD (Disnakertrans Prov. Jateng) tidak mencapai target.	Risiko Strategis	- Kurangnya pemahaman pegawai Disnakertrans Jateng terhadap Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan, Sub kegiatan beserta indikator kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan Risiko oleh OPD (Disnakertrans Jateng). Dan tidak memahami perencanaan dan Penganggaran serta mekanismenya, baik itu Renstra OPD dan Renja OPD - Kurang pemahamannya pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan kegiatan) - Kurang cermatnya dalam pelaporan kegiatan baik kinerja dan anggaran	Banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang muncul sedangkan pembiayaan terbatas. Dan permasalahan ketenagakerjaan tidak semuanya bisa ditangani oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sendiri saja, tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait atau pun OPD pengampu sektoral lainnya	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
12	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Masih ada Pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari Disnakertrans Prov. Jateng	Risiko Strategis	- Penerapan SOP yang belum optimal - Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap keterbukaan Informasi Publik masih belum merata	- Pelayanan pada masyarakat kurang optimal - Kurangnya Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap jenis pelayanan yang ada di OPD - Lambatnya pelayanan yang diberikan masyarakat karena penerapan SOP yang belum optimal	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
13	Sasaran Strategis	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1. Kab/Kota masih belum tepat dalam menyusun kebijakan dan indikator yang ditunjukkan dalam membangun ketenagakerjaan 2. Resiko SDM Dinas kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM perusahaan banyak yang tidak memahami pentingnya RTK Mikro di perusahaan dan kemanfaatannya	Risiko Operasional	1. Kab/kota belum menyusun RTKD 2. Kurangnya perusahaan dari SDM yang membidangi ketenagakerjaan kab/kota untuk menyusun RTKD 3. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan SKPD terkait diluar Disnakertrans Kab/kota belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD 4. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan perusahaan tidak mengerti kegunaan/kemanfaatan RTK Mikro di perusahaan dalam keberwujudan tenaga kerja di perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan serta bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi adanya redesign budget, redesign program, redesign supply dan demand 5. Dinas Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum memanfaatkannya dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan serta penganggaran pada dokumen perencanaan baik RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD. 6. SDM Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM di perusahaan di kab/kota tidak memahami penyusunan RTK Mikro di perusahaan serta manfaat atau kegunaan terkait pemberdayaan tenaga kerja di perusahaan maupun dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, redesign supply dan demand	Dinas Kab/kota tidak tepat dalam pemilihan dan penetapan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RRPD. Sehingga akan menyebabkan ketidaktepatan dalam melakukan intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kabupaten/kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, Renstra, OPD, dsb).	Masyarakat, pengusaha, pekerja dan instansi pemerintah terkait pengampu 17 sektor (Bappeda, DPMPPTSP, BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Perindag, Dinkop UKM, Disporapar, dsb)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Terganggunya Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah / tidak berjalan dengan lancar	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Akan mempengaruhi kelancaran Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	ASN Dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
15	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	Risiko Operasional	1.Kurangnya pemahaman pegawai terkait penjenjangan kinerja, Indikator Kinerja baik Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Utama OPD atau Indikator Kinerja; Sasaran; Program; Kegiatan; Sub kegiatan; 2.Kurang tepatnya pegawai dalam menyusun rencana penjadwalan kegiatan. 3.Pegawai kurang memahami penggunaan aplikasi e Controlling kinerja dan jenis indikator yang dipakai dalam mengevaluasi kinerja.	Kinerja Perangkat Daerah tidak tercapai	Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terganggunya Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah / tidak berjalan dengan lancar	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Akan mempengaruhi kelancaran Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
17	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	Beberapa LPK belum bersertifikat atau belum terakreditasi	Risiko Strategis	LPK belum terdaftar di data Kelembagaan Kemnaker	LPK tidak bisa melakukan pengajuan akreditasi	Lembaga Pelatihan Kerja
18	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Kualitas produksinya belum memenuhi standar yang ditentukan	Risiko Operasional	Belum semua perusahaan di Jawa Tengah menerapkan Peningkatan Produktivitas	Produktivitas tenaga kerja rendah dan kurang efisien, efektif, serta kualitas produksinya belum memenuhi standar yang ditentukan	Masyarakat di dunia usaha dan dunia industri
19	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	Pencari tenaga kerja memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan cukup rendah	Risiko Strategis	Pencari Tenaga kerja tidak memiliki kompetensi	Tingkat pengangguran tidak teratasi dengan baik	Pencaker dan Tenaga Kerja
20	Sasaran Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan / atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, miss match dan sebab lainnya)	Risiko Strategis	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	1. Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2. Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3. Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja	Pencari Kerja, Calon Pencari Kerja, Tenaga Kerja, Masyarakat, Pemangku Kepentingan (Pemerintah dan Swasta)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Sasaran Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	Pencari Kerja/ Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	Risiko Strategis	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta / kelompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
22	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	Risiko Strategis	Alokasi penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak seimbang dengan jumlah masyarakat Jawa Tengah yang telah mendaftar sebagai Calon Transmigran	1. Calon Transmigran yang telah mendaftar dalam program penempatan transmigrasi masuk dalam masa tunggu yang lama untuk ditempatkan 2. Dalam masa tunggu tersebut calon transmigran memiliki resiko melewati batas umur yang ditetapkan peraturan sehingga gagal ditempatkan 3. Pencapaian target penempatan tidak memenuhi sasaran	Masyarakat dan Calon Transmigran
23	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	Risiko Operasional	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan -Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik / masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejala di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pengusaha dan Pekerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Sasaran Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	Risiko Operasional	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	-Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan -Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan pekerja/ buruh pada BPJS Ketenagakerjaan -Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/ masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/ buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pengusaha dan pekerja
25	Sasaran Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	Risiko Operasional	Perusahaan tidak mengetahui, memahami, atau tidak mau melaksanakan aturan maupun penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan	Tidak adanya pengaturan dan perlindungan upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun, ketentuan terkait struktur skala dan upah bila tidak dilaksanakan terdapat sanksi administrasi, Pelaksanaan upah yang kurang layak dan berkeadilan bagi pekerja sebagai upaya peningkatan produktivitas perusahaan, potensi desakan sp/sb dalam penegakan struktur dan skala upah di perusahaan	Pemerintah, Pengusaha, Pekerja
26	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Perusahaan tidak menerapkan struktur dan skala upah	Risiko Operasional	Perusahaan tidak mengetahui, memahami, atau tidak mau melaksanakan aturan maupun penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan	Tidak adanya pengaturan dan perlindungan upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun, ketentuan terkait struktur skala dan upah bila tidak dilaksanakan terdapat sanksi administrasi, Pelaksanaan upah yang kurang layak dan berkeadilan bagi pekerja sebagai upaya peningkatan produktivitas perusahaan, potensi desakan sp/sb dalam penegakan struktur dan skala upah di perusahaan	Pemerintah, Pekerja, Pengusaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5. Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	Risiko Hukum	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	Tenaga Kerja dan Pengusaha
28	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	Kegiatan pelatihan yang tidak diimbangi dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang menanganinya	Risiko Strategis	Instruktur banyak yang telah purna tugas	Pelaksanaan pelatihan yang kurang optimal	BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
29	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Strategis	Adanya kelalaian atau kelupaan tentang absensi pegawai secara aplikasi sinaga dan kelalaian kenaikan gaji berkala bagi pegawai di lingkungan BLK Cilacap, kurang lengkapnya arsip pegawai yang bersangkutan.	Di presensi aplikasi sinaga akan muncul keterangan KWK, adanya pegawai yang gaji berkala tidak sesuai dengan tahun pengangkatan karena yang bersangkutan lupa, adanya arsip pegawai yang belum dilengkapi.	ASN
30	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	Program Pelatihan tidak tepat sasaran / peserta dilatih bukan merupakan pengangguran	Risiko Operasional	1. Proses seleksi / penentuan calon peserta pelatihan kurang teliti 2. Tidak adanya SOP sebagai panduan proses seleksi	1. Pelatihan tidak tepat sasaran 2. Jumlah tenaga kerja kompeten berkurang	1. Pencari kerja yang membutuhkan pelatihan 2. OPD dan UPT
31	Sasaran Program	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	Peserta pelatihan calon transmigrasi tidak hadir pada saat pelaksanaan pelatihan	Risiko Operasional	1. Calon transmigran mengundurkan diri pada saat akan melaksanakan pelatihan 2. Data calon Transmigran berubah - ubah	Target peserta pelatihan calon transmigran tidak tercapai	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
32	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan kepegawai yang ada di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan maksimal	Risiko Operasional	1. Pegawai yang memiliki tupoksi kegiatan pelayanan umum berkurang karena purna tugas 2. Kemampuan pegawai yang menjalankan pelayanan umum tidak update	1. ada pekerjaan yang terhambat dan tidak mencapai target 2. Over load beban pekerjaan pada pekerja tertentu 3. Membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pelayanan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	Hasil pelatihan peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan tidak signifikan terhadap lulusan/ alumni pelatihan	Risiko Operasional	Terbatasnya pendampingan pasca pelatihan, dan perumusan tolok ukur keberhasilan pelatihan pada pelatihan softskill, sehingga sulit menilai secara kuantitatif.	Peningkatan produktivitas tenaga kerja belum dapat dilihat kenaikannya secara signifikan	Pemerintah, tenaga kerja, pelaku usaha
34	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	Skill lulusan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan DUDI	Risiko Operasional	Kebijakan penentuan program pelatihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Penyerapan pengangguran pada DUDI tidak optimal	Pemerintah
35	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	Penerapan hasil bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas tidak dilaksanakan secara berkesinambungan	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak konsisten dalam menerapkan alat, teknik, metode peningkatan produktivitas karena tidak ada pengawasan dari pemerintah dalam kontinuitas peningkatan produktivitas	Peningkatan produktivitas tidak kontinyu	Pemerintah, pelaku usaha
36	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	Banyak perusahaan tidak menerapkan pengukuran produktivitas perusahaan	Risiko Operasional	Tidak semua pelaku usaha mengetahui pentingnya penerapan pengukuran produktivitas meskipun sudah ada Peraturan Menteri tentang SIMPPRO (sistem Informasi Manajemen Produktivitas) sebagai alat ukur peningkatan produktivitas	Perusahaan tidak memahami masalah-masalah peningkatan produktivitas karena tidak mengetahui alat ukur dan tidak bersedia diukur peningkatan produktivitasnya karena banyak data yang tidak tersedia	Pemerintah, pelaku usaha
36	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum perkantoran, kepegawaian, dan keuangan	Risiko Operasional	Kenaikan harga barang/jasa pada tahun berjalan	Ada sebagian rencana yang belum/tidak dapat dilaksanakan, karena terjadi penyesuaian terhadap rencana belanja barang/jasa sesuai prioritas kebutuhan	Pelaksana
37	Sasaran Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Hubungan Kerja yang tidak kondusif antara Pekerja dan Pengusaha	Risiko Hukum	Pengusaha tidak mematuhi norma Hubungan Industrial	Pekerja tidak terlindungi	Pekerja dan Pengusaha
38	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terganggunya Kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Risiko Operasional	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	akan mempengaruhi kelancaran kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	BP3TK Prov. Jateng
39	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terganggunya kegiatan pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, keuangan perangkat daerah	akan mempengaruhi kegiatan kelancaran pelayanan umum kepegawaian, keuangan perangkat daerah	BP3TK Provinsi Jawa Tengah
40	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau timbulnya penyakit akibat kerja di perusahaan	Risiko Operasional	Kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan K3 masih kurang	Menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	Tenaga Kerja dan Perusahaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terganggunya kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah tidak bisa berjalan lancar	Balai Keselamatan Kerja dan masyarakat pengguna
42	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak sesuai realisasi anggaran yang diberikan dengan rencana yang diajukan	Risiko Operasional	Refokusng anggaran untuk program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah menjadi tidak optimal	Balai K2, Dinas Nakertrans, perusahaan dan masyarakat
43	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	Target Peserta Tidak Terpenuhi	Risiko Operasional	Peserta Pelatihan mengundurkan diri pada saat kegiatan pelatihan sedang berlangsung	Tidak Tersedianya Tenaga Kerja yang Kompeten Sesuai Perencanaan	BLK Semarang 1
44	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terganggunya Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah / tidak berjalan dengan lancar	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Akan mempengaruhi kelancaran Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	BLK Semarang 1 dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan
45	Sasaran Kegiatan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan tidak tepat	Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - SDM tidak dapat menghitung persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja - SDM tidak dapat membaca indikator data terkait informasi makro (laju pertumbuhan, PDRB, dsb) - SDM kurang memahami potensi daerah - SDM di daerah bermutasi/bertukar dengan cepat 	SDM tidak dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja kedepannya seperti apa, sehingga kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan datang, belum bisa mengantisipasi/mengmitigasi	Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	1. Kode rekening belanja tidak sesuai dengan peruntukan dan penganggaran; 2. Unit kerja tidak dapat membedakan kategori belanja yang menambah asset atau belanja habis pakai; 3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan; 4. Target kinerja program/kegiatan tidak mencapai target yang direncanakan dalam Renstra, Renja, RKPD; 5. Kurang cermatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan inputing dokumen perencanaan dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran.	Risiko Operasional	1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kode rekening belanja dan penganggaran serta terhadap peraturan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran; 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap aturan pengadaan, barang, dan jasa; 3. Adanya perubahan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran; 4. Pegawai kurang memahami indikator kinerja yang digunakan baik Indikator outcome maupun output dan cara memperoleh data dukung indikator tersebut; 5. Terbatasnya waktu yang diberikan untuk inputing dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran.	Kurang tepatnya dalam menentukan target kinerja dan penganggaran, yang disesuaikan dengan kebijakan daerah yang menjadi prioritas, penggunaan kode rekening belanja maupun harga satuan harga (standar harga); Kurang tepatnya dalam inputing dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja ke dalam aplikasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; Kurang tepat dalam menjabarkan target kinerja dan memperkirakan hasil kinerja / realisasi kinerjanya.	Masyarakat, Pencari kerja, Disnakertrans Prov.Jateng
47	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Dokumen administrasi keuangan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	- Pemahaman Pegawai terhadap wawasan administrasi keuangan dan perpajakan yang rendah - Keterbatasan SDM	Proses pencairan dana untuk mendukung kegiatan menjadi terhambat Adanya temuan administrasi keuangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48	Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Timbulnya kerusakan Aset/Barang Milik Daerah yang lebih luas/besar	Risiko Operasional	Kurangnya anggaran Administrasi Barang Milik Daerah	Gedung dan kendaraan dinas yang tidak diasuransikan tidak terjamin resikonya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
49	Sasaran Kegiatan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan/pendapatan/ retribusi daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	penerimaan/pendapatan/retribusi daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	kurangnya inovasi, tidak didukung dengan sarana prasarana pendukung	Realisasi pendapatan daerah yang tidak terpenuhi dari target	pengelola penerimaan retribusi daerah
50	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya pegawai yang mengikuti Diklat	Risiko Operasional	tidak banyak minat pegawai untuk mengikuti diklat	penyerapan anggaran tidak bisa 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
51	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak tercapainya target kegiatan	Risiko Operasional	Pencatatan tidak sesuai dengan tanggal surat yang ada, sehingga kadang kadang terjadi keterlambatan informasi undangan pelaksanaan kegiatan	penyerapan anggaran tidak bisa 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Tidak terpenuhinya target pengadaan barang milik daerah	Risiko Fraud	Pengadaan barang milik daerah Harus memperhatikan peraturan TKDN	Inefisiensi anggaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
53	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kurang tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga teknis kegiatan, jasa komunikasi dan listrik	Risiko Operasional	Kurangnya tenaga jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dan anggaran Jasa Keamanan dan Kebersihan	Kurangnya Tenaga Security dan Cs	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
54	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak tercapainya target kegiatan	Risiko Operasional	Kurangnya anggaran pemeliharaan gedung dan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas	tidak semua gedung dan kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
55	Sasaran Strategis	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	Peserta yang tidak kompeten	Risiko Strategis	Peserta kurang menguasai bidang keahlian yang dimiliki, kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap	Pekerjaan tidak sesuai standar sehingga pekerjaan tidak baik	Peserta Uji Kompetensi
56	Sasaran Strategis	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	Tidak terserapnya peserta magang menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan	Risiko Strategis	Tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, tidak memiliki kompetensi, minat pendaftar sedikit	Tingkat pengangguran tidak teratasi	Peserta
57	Sasaran Strategis	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	LPK yang tidak terakreditasi	Risiko Strategis	LPK tidak memenuhi dokumen KMPI (standar 1 sampai standar 8)	LPK tersebut tidak kredibel di mata masyarakat karena sistem manajemen yang tidak sesuai dengan standar pemerintah	Lembaga Pelatihan Kerja
58	Sasaran Kegiatan	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas dimungkinkan tidak sesuai dengan yang di inginkan.	Risiko Operasional	Sumber Daya Pelatihan (SDP) antara lain kurikulum, peserta, lokasi/tempat pelatihan serta sarana dan prasarana	-Peserta tidak memahami materi, - Peserta tidak mengikuti pelatihan sampai selesai, - Peserta tidak memahami materi, -Penyelenggara kurang selektif dalam merekrut peserta.	Masyarakat, Pengusaha, Pekerja serta Stakeholder terkait.
59	Sasaran Kegiatan	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	Risiko Strategis	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja	Pencari Kerja, Masyarakat, Calon Tenaga Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Sasaran Strategis	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	Sarana produktif tidak selesai terbangun sesuai rencana	Risiko Strategis	Sebagian warga miskin dan ekstrim miskin tidak terbiasa melakukan pekerjaan fisik/ membangun sarana produktif/ teknik pertukangan	Sarana Produktif belum layak untuk digunakan untuk melakukan kegiatan produktif	Masyarakat
61	Sasaran Strategis	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	Peserta pemberdayaan, baik pencari kerja dan masyarakat tidak dapat melanjutkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	Risiko Strategis	- Tidak ada fasilitasi modal untuk bantuan sarana usaha serta modal usaha - Keterbatasan akses pasar - Menjadi wirausaha membutuhkan waktu, mental, konsistensi	Antusiasme melanjutkan usaha rendah dan mudah menyerah saat hasil tidak sesuai ekspektasi	Masyarakat
62	Sasaran Kegiatan	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	Petugas lapangan tidak memahami tugas pendampingan wirausaha	Risiko Strategis	Keterbatasan SDM pada Dinas Kab/Kota	Kinerja Pendampingan tidak optimal	Masyarakat
63	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	Risiko Strategis	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja	Pencari Kerja, Masyarakat, Calon Tenaga Kerja
64	Sasaran Kegiatan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di	Peserta pemberdayaan, baik PMI Purna dan Keluarga PMI tidak bisa mengembangkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	Risiko Strategis	- Mindset PMI Purna masih terbiasa sebagai mental pekerja - Keterbatasan akses pasar - Menjadi wirausaha membutuhkan waktu, mental, konsistensi	Antusiasme melanjutkan usaha rendah dan mudah menyerah saat hasil tidak sesuai ekspektasi	Masyarakat
65	Sasaran Kegiatan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di	Salah satu tujuan desmigratif berupa pengembangan usaha produktif tidak optimal	Risiko Strategis	Desa, selaku stakeholder utama program desmigratif, belum memahami program desmigratif sehingga komitmen desa masih rendah	Desmigratif tidak bisa berkembang sesuai rencana	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Sasaran Kegiatan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	Risiko Hukum	1. Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2. Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3. Masih adanya ego sektoral antar stakeholder penempatan PMI 4. Belum optimalnya penyebaran informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5. Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Pencari Kerja Masyarakat Perusahaan/Us er Pemerintah
67	Sasaran Kegiatan	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	Risiko Hukum	1. Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2. Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3. Belum optimalnya penyebaran informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di daerah 4. Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	TKA Pemberi Kerja TKA Pemerintah
68	Sasaran Kegiatan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	Risiko Strategis	Alokasi penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak seimbang dengan jumlah masyarakat Jawa Tengah yang telah mendaftar sebagai Calon Transmigran	"1. Calon Transmigran yang telah mendaftar dalam program penempatan transmigrasi masuk dalam masa tunggu yang lama untuk ditempatkan 2. Dalam masa tunggu tersebut calon transmigran memiliki resiko melewati batas umur yang ditetapkan peraturan sehingga gagal ditempatkan 3. Pencapaian target penempatan tidak memenuhi sasaran"	Masyarakat dan Calon Transmigran
69	Sasaran Kegiatan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	Masih terdapat perusahaan belum memiliki PP/PKB	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran hukum Pengusaha dalam membuat/menyusun PP/PKB	Tidak adanya kepastian hukum terkait syarat - syarat kerja dalam pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha	Pengusaha dan Pekerja
70	Sasaran Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Permasalahan terkait Hubungan Industrial dan Jamsos tidak termonitor dengan baik; Pekerja diperlakukan tidak adil; Banyak perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit	Risiko Strategis	Data HI tidak Valid dan update; Pekerja dan Pengusaha tidak Memahami Syarat Kerja; Kurangnya pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan (dari 4.032 perusahaan yang wajib membentuk sampai dengan saat ini baru 1.910)	1. Kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tidak tepat 2. Kondisi HI tidak kondusif/ kurang harmonis 3. Mengganggu stabilitas produktivitas perusahaan	Pengusaha dan pekerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Sasaran Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratid dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	Perusahaan tidak menerapkan struktur dan skala upah	Risiko Operasional	Perusahaan tidak mengetahui, memahami, atau tidak mau melaksanakan aturan maupun penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan	Tidak adanya pengaturan dan perlindungan upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun, ketentuan terkait struktur skala dan upah bila tidak dilaksanakan terdapat sanksi administrasi, Pelaksanaan upah yang kurang layak dan berkeadilan bagi pekerja sebagai upaya peningkatan produktivitas perusahaan, potensi desakan sp/sb dalam penegakan struktur dan skala upah di perusahaan	Pemerintah, Pengusaha, Pekerja
72	Sasaran Strategis	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	1. Adanya penolakan formula penghitungan upah minimum yang diatur dalam UU dan PP menyebabkan kondisi Hubungan Industrial yang tidak kondusif; 2. Adanya rekomendasi UMK dari Bupati/Walikota yang tidak sesuai dengan ketentuan UU/PP.	Risiko Strategis	1. Ketentuan mengenai penetapan upah minimum telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 dan PP.51 Tahun 2023; 2. Kebijakan pengupahan merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakannya	1. Adanya demo/ unjuk rasa serikat pekerja/ serikat buruh menolak formula perhitungan UM; 2. Adanya gugatan dari SP/SB atau organisasi pengusaha terhadap keputusan Gubernur tentang UMP/UMK	Pemerintah, Pengusaha, Pekerja, Masyarakat, Dunia Usaha
73	Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	1. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 2. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja	Risiko Hukum	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	1. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 2. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	Pengusaha/pem beri kerja dan Pekerja/Buruh
74	Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	Risiko Hukum	1. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja 2. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	Tingginya Angka Kecelakaan kerja dan/atau penyakit Akibat Kerja	Pengusaha dan Tenaga Kerja
75	Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	Risiko Hukum	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja	Tenaga Kerja dan Pengusaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	Jumlah Terlaksananya Kerjasama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan penempatan lulusan dengan Perusahaan / Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Risiko Strategis	kurangnya minat kerjasama dari pihak ke tiga	Pelaksanaan pelatihan yang kurang optimal	Alumni dan Balai Latihan Kerja Cilacap Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
77	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	Jumlah calon Pendaftar Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan masih tingkat dasar	Risiko Strategis	animo pencari kerja sebagian besar berasal dari sekolah menengah kejuruan	Pelaksanaan pelatihan yang kurang optimal	Balai Latihan Kerja Cilacap Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
78	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau)	Tidak tercapainya proses penempatan para peserta pelatihan	Risiko Strategis	Peserta kegiatan Pelatihan berasal dari petani tembakau	Proses penempatan tidak tercapai secara optimal	Balai Latihan Kerja Cilacap Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
79	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	Risiko Strategis	Bengkel dan Peralatan pelatihan kerja yang digunakan sudah tua	Output yang dihasilkan tidak optimal dalam pemenuhan dunia usaha dunia industri	Alumni dan BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
80	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	Adanya calon peserta pelatihan yang mendaftar dan dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri	Risiko Strategis	Tidak konsistennya para calon peserta pelatihan	Kurangnya jumlah peserta pelatihan	BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
81	Sasaran Strategis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Terjadi antara realisasi fisik dan keuangan agak berbeda	Risiko Strategis	Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi SPJ belum diajukan	Maka akan terjadi perbedaan presentase antara realisasi fisik dan keuangan	BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
82	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Adanya surat yang masuk tidak sesuai dengan tanggal di surat sehingga kadang kadang terjadi keterlambatan informasi undangan pelaksanaan kegiatan	Risiko Strategis	Pengiriman surat yang terlambat sehingga tidak sesuai tanggal di surat dengan tanggal penerimaan surat	Pencatatan tidak sesuai dengan tanggal surat yang ada, sehingga kadang kadang terjadi keterlambatan informasi undangan pelaksanaan kegiatan	BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Adanya tidak kesesuaian antara spek ajuan dengan pembelian	Risiko Strategis	Adanya fluktuasi harga	Adanya ketidaksesuaian dengan pihak yang mengajukan atau kualitasnya berkurang	BLK CILACAP
84	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Saat ini BLK tidak ada langganan surat kabar	Risiko Strategis	Saat ini sudah menggunakan media online	kadang kadang berita di surat kabar yang sedang ada di headline kita agak terlambat informasi berita tersebut	BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
85	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Risiko Strategis	Anggaran yang turun tidak sesuai dengan yang diajukan	Dana yang ada sudah dimaksimalkan tetapi sangat kurang mencukupi	BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
86	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /keepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	Lembaga yang mejalin kerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan bidang pelatihan yang diselenggarakan oleh Balatkertrans	Risiko Operasional	Tidak adanya identifikasi dunia kerja dan Dunia Industri	1. Naskah kerjasama tidak bermanfaat 2. Bekerja tidak efektif dan efisien	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
87	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau)	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan berkurang	Risiko Operasional	Peserta pelatihan mengundurkan diri pada saat pelatihan sudah berjalan	1. Jumlah tenaga kerja kompeten yang terlatih berkurang 2. Kinerja organisasi tidak tercapai	Organisasi perangkat daerah (OPD)dan UPT
88	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	Peserta pelatihan mengundurkan diri pada saat pelatihan berlangsung	Risiko Operasional	Peserta pelatihan tidak komitmen Peserta pelatihan melanjutkan pendidikan atau keterima kerja	Target kinerja organisasi tidak tercapai Jumlah tenaga kerja kompeten yang terlatih berkurang	Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan UPT
89	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	Sarana yang dibelanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan	Risiko Operasional	Tidak ada identifikasi kebutuhan Tidak melibatkan stakeholder internal dalam proses perencanaan	Sarana hasil pengadaan tidak terpakai Pemborosan anggaran	UPT Bagian terkait (Kejuruan) Peserta pelatihan
90	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan	Dokumen hasil Training Needs Analysis tidak dapat digunakan untuk dasar perencanaan kegiatan pelatihan	Risiko Operasional	Petugas yang melaksanakan TNA belum memiliki kompetensi	Kualitas dokumen TNA rendah Hasil TNA tidak dapat digunakan untuk merencanakan pelatihan Program pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan	Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPT)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sasaran Kegiatan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	Calon Transmigran mengundurkan diri pada saat akan dilakukan pelatihan	Risiko Operasional	Calon transmigran berubah niat	Target kinerja tidak tercapai	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
92	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah honor yang diberikan melebihi ketentuan yang ada	Risiko Fraud	Tidak melakukan reviu peraturan terkait	Kelebihan pembayaran	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Negara
93	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan barang administrasi Umum perangkat daerah lebih kecil dari pada kebutuhan layanan	Risiko Operasional	1. Perencanaan tidak melibatkan semua pihak	adanya kegiatan yang tidak tercover / terpenuhi Kegiatan UPT akan terganggu	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
94	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang yang dibutuhkan tidak dapat belanjakan Harga barang melebihi pagu yang tersedia Barang yang dibutuhkan tidak tersedia di market place yang di tentukan oleh pemerintah	Risiko Operasional	1. Barang tidak mengandung TKDN 2. Harga barang di E-SHB lebih rendah 3. minimnya barang yang tersedia di market place yang ditentukan oleh pemerintah 2. Minimnya penyedia	membutuhkan waktu yang lama untuk membelanjakan karena 1. harus mengurus ijin ke Sekda 2. Mengajukan reviu E_SHB	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
95	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	adanya kenaikan tarif jasa / barang tertentu yang tidak diprediksi (listrik / telepon)	Risiko Operasional	Perencanaan tidak mempertimbangkan proyeksi kenaikan dan riwayat pembayaran sebelumnya	kekurangan dana untuk melakukan pembayaran	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
96	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah sarana yang perlu diperbaiki lebih besar daripada anggaran yang tersedia	Risiko Operasional	adanya sarana baru yang membutuhkan perbaikan pada saat anggaran sudah ditetapkan	adanya sarana yang tidak dapat dilakukan perbaikan / pemeliharaan pada saat anggaran sudah ditetapkan	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
97	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Pergantian peserta di saat pelaksanaan pelatihan	Risiko Operasional	Kurangnya ketegasan dalam perekrutan peserta pelatihan	Proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan berjalan kurang lancar	Pemerintah
98	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Ruangan lokasi pelaksanaan pelatihan tidak memadai (panas/ lantai pecah/ ambles/ bising)	Risiko Operasional	Koordinasi antara dinas ketenagakerjaan setempat dengan target lokasi pelatihan kurang maksimal	Pelaksanaan pelatihan kurang berjalan dengan lancar	Pemerintah, tenaga kerja, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Kendala teknis dan sinyal internet untuk materi digital marketing	Risiko Operasional	Lokasi pelatihan yang tidak memadai sarana internetnya	Pelaksanaan pelatihan kurang berjalan dengan lancar	Pemerintah, tenaga kerja, masyarakat
100	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Prasarana pelatihan kurang memadai di daerah	Risiko Operasional	Koordinasi antara dinas ketenagakerjaan setempat dengan target lokasi pelatihan kurang maksimal	Pelaksanaan pelatihan kurang berjalan dengan lancar	Pemerintah, tenaga kerja, masyarakat
101	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Keragaman level pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penggunaan teknologi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	Kurang selektif dalam perekrutan peserta pelatihan	Pelaksanaan pelatihan kurang berjalan dengan lancar karena harus menyesuaikan skill yang berbeda-beda	Pemerintah, tenaga kerja, masyarakat
102	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Keterlambatan penyelenggara karena force majeure	Risiko Reputasi	Kondisi bencana alam yang mempersulit akses jalan	Menurunnya kepuasan masyarakat	Pemerintah, tenaga kerja, masyarakat
103	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Perwakilan perusahaan yang tidak dapat menghadiri kegiatan secara mendadak	Risiko Kemitraan	Kurangnya komunikasi secara langsung dengan calon peserta kegiatan / perwakilan perusahaan	Pemilihan peserta kegiatan dilakukan oleh petugas dari dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada komunikasi secara langsung dengan calon peserta	Pemerintah dan tenaga kerja
104	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Perusahaan tidak bersedia mengikutkan tenaga kerjanya untuk mengikuti pelatihan karena durasi dinilai cukup lama bagi perusahaan	Risiko Kemitraan	Kurangnya kepedulian perusahaan atas investasi waktu dalam mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam pelatihan	Produktivitas perusahaan memiliki potensi yang rendah untuk meningkat	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Peserta kurang mampu menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan	Risiko Operasional	Instruktur kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya	Peserta tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
106	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Peserta tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan di tempat kerjanya	Risiko Operasional	Kurangnya motivasi dari peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan	Produktivitas tenaga kerja dan perusahaan tidak meningkat	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
107	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Peserta tidak lulus dalam uji kompetensi	Risiko Reputasi	Kurangnya kemampuan peserta yang bisa disebabkan oleh kurang maksimal proses pembelajaran	Pencapaian jumlah tenaga kerja yang kompeten tidak maksimal	Pemerintah, perusahaan
108	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Lulusan pelatihan belum dapat maksimal ditempatkan/ membuka usaha	Risiko Kemitraan	Belum ada prosedur kemitraan/ partnership dengan perusahaan penerima lulusan peserta pelatihan	Pengurangan tingkat pengangguran kurang maksimal	Pemerintah, tenaga kerja
109	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	Tidak terpenuhinya pelayanan peningkatan sarana pelatihan kerja	Risiko Operasional	Perubahan kondisi harga dan ketersediaan barang pada tahun berjalan	memenuhi pelayanan terhadap peningkatan sarana pelatihan kerja tidak sesuai rencana, sehingga pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran tidak/kurang memadai	Pelaksana

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	Perusahaan yang melakukan kerjasama meminta durasi hari pelatihan lebih singkat dari pada seharusnya	Risiko Kemitraan	Perusahaan harus mengatur ulang jam kerja dan beban kerja karyawan yang mengikuti pelatihan	Penyampaian materi pelatihan kurang optimal	Pemerintah dan tenaga kerja
111	Sasaran Kegiatan	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Perusahaan tidak bersedia mengikuti prosedur bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas	Risiko Kemitraan	Kurangnya pemahaman perusahaan atas pentingnya peningkatan produktivitas	Produktivitas perusahaan memiliki potensi yang rendah untuk meningkat, tidak ada kreativitas dan inovasi baru dalam keberlangsungan perusahaan	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
112	Sasaran Kegiatan	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	Perusahaan tidak bersedia diukur produktivitas tenaga kerjanya	Risiko Kemitraan	Kurangnya pemahaman perusahaan target pengukuran atas pentingnya pengukuran produktivitas tenaga kerja	Tenaga kerja tidak terukur produktivitasnya sehingga tidak bisa menjadi bahan kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
113	Sasaran Kegiatan	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	Risiko Kemitraan	Kebijakan perusahaan masing-masing yang tidak bisa dicampurtangan oleh pemerintah	Tenaga kerja tidak terukur produktivitasnya sehingga tidak bisa menjadi bahan kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
114	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang kurang tepat	Risiko Operasional	Keterbatasan personel	Distribusi pemenuhan pelayanan administrasi keuangan yang kurang tepat	Pelaksana
115	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Kenaikan harga barang/jasa pada tahun berjalan	pemenuhan pelayanan administrasi umum yang tidak sesuai rencana, karena ada penyesuaian sesuai kebutuhan prioritas	Pelaksana

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Risiko Operasional	Kenaikan harga barang/jasa pada tahun berjalan dan pemakaian jasa yang di luar perkiraan tahun berjalan	memenuhi pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kurang optimal dan tidak sesuai rencana	Pelaksana
117	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai	Risiko Operasional	kenaikan harga barang/jasa pada tahun berjalan	memenuhi pelayanan terhadap pemeliharaan barang milik daerah tidak sesuai rencana, sehingga pemenuhan kebutuhan pemeliharaan tidak/kurang memadai	Pelaksana
118	Sasaran Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	Terjadinya perselisihan ketenagakerjaan (HI dan Penempatan TK)	Risiko Hukum	Rendahnya kesadaran Pengusaha dan pekerja akan pentingnya mentaati Norma Ketenagakerjaan	Rendahnya Perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha	Pekerja dan pengusaha
119	Sasaran Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Masih tingginya perselisihan Hubungan Industrial	Risiko Hukum	perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.	Kondisi Hubungan Industrial tidak Harmonis	Pekerja
120	Sasaran Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Masih tingginya perselisihan penempatan tenaga kerja dan kasus Pekerja Migran Indonesia	Risiko Hukum	Kurangnya kesadaran dari Pemberi Kerja dan Kompetensi Pekerja Migran yang rendah	Kurangnya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia	Pekerja Migran Indonesia
121	Sasaran Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK	Risiko Hukum	Kondisi Geopolitik yang tidak kondusif yg menyebabkan lesunya perekonomian dunia dan berpengaruh pada negara-negara tujuan ekspor hasil industri Indonesia	Penurunan tingkat kesejahteraan pekerja	Pekerja di perusahaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jika terjadi kekosongan pada pelaksanaan Transaksi Keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	Risiko Operasional	kekosongan pada pelaksanaan Transaksi Keuangan	Penyerapan anggaran tidak bisa 100%	BP3TK prov. Jateng
123	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jika terjadi kekosongan pada pelaksanaan Transaksi keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	Risiko Operasional	Kekosongan pada pelaksanaan transaksi keuangan	Penyerapan anggaran tidak bisa 100%	BP3TK Provinsi Jawa Tengah
124	Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tidak Terpenuhinya target pengadaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Ada beberapa barang yang belum mengandung TKDN	Tidak Terpenuhinya target pengadaan barang	BP3TK prov. Jateng
125	Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tidak terpenuhinya Target pengadaan Barang Milik Daerah	Risiko Operasional	ada beberpa barang yang belum mengadung TKDN	Tidak terpenuhinya target pengadaan barang	BP3TK prov. Jateng
126	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	3.tidak tercapainya target kegiatan	Risiko Operasional	Di dalam Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat Sug Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM Genset)	Jika terjadi kenaikan harga BBM dan Tingkat Pemedaman Listrik maka akan berpengaruh pada realisasi Kegiatan	BP3TK prov. Jateng
127	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak tercapainya target kegiatan	Risiko Operasional	didalam administrasi umum perangkat daerah terdapat sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor (BBM Genset)	jika terjadi kenaikan harga BBM dan tingkat pemadaman listrik maka akan berpengaruh pada realisasi kegiatan	BP3TK
128	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Tidak terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Beberapa barang tidak ada unsur TKDN	Tidak terpenuhinya target BMD	BP3TK
129	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	tidak tercapainya realisasi kegiatan	Risiko Operasional	di dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat Sub Kegiatan (Jasa Pengiriman Surat dan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik)	Terjadinya silfa pada realisasi keuangan	BP3TK prov. Jateng
130	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak tercapainya realisasi kegiatan	Risiko Operasional	didalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terdapat sub kegiatan (jasa pengiriman surat dan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan litrik)	terjadinya SILPA pada realisasi keuangan	BP3TK
131	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	tidak tercapainya realisasi Kegiatan	Risiko Operasional	KENAIKAN BBM SERING TERJADI	REALISASI KEG TDK TERCAPAI	BP3TK prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	tidak tercapainya realisasi kegiatan	Risiko Operasional	Kenaikan BBM sering terjadi	Realisasi kegiatan tidak tercapai	BP3TK
133	Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Meningkatnya angka kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja di perusahaan	Risiko Operasional	Pemahaman dan komitmen tenaga kerja dan pengusaha terhadap pelaksanaan K3 masih kurang	Menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	Tenaga Kerja dan Perusahaan
134	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Terganggunya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Pencairan keuangan terlambat	Pelaksanaan kegiatan administrasi pada Balai Keselamatan Kerja terganggu	Balai Keselamatan Kerja
135	Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kerusakan sarana dan prasarana kantor	Risiko Operasional	Usia sarana dan prasarana kantor dan/atau terjadinya kecelakaan/bencana alam	Kegiatan administrasi dan operasional Balai Keselamatan Kerja tidak bisa dilaksanakan	Balai Keselamatan Kerja dan masyarakat pengguna
136	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terganggunya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Risiko Operasional	Adanya kejadian yang tidak terduga	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah tidak berjalan dengan baik	Balai Keselamatan Kerja
137	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Spesifikasi barang yang diadakan kurang sesuai dengan kebutuhan	Risiko Operasional	Adanya persyaratan wajib TKDN dalam pengadaan barang	Hasil pekerjaan terkait dengan barang yang diadakan tidak optimal	Balai Keselamatan Kerja dan masyarakat pengguna
138	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jasa pelayanan umum tidak terselenggara dengan baik	Risiko Operasional	Kinerja tenaga jasa pelayanan umum kurang baik	Terjadi hal-hal yang merugikan bagi Balai Keselamatan Kerja	Balai Keselamatan Kerja
139	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadinya kerusakan pada sarana operasional kantor	Risiko Operasional	Usia dari sarana operasional kantor yang sudah tua	Kegiatan operasional kantor tidak terselenggara dengan baik	Balai Keselamatan Kerja dan masyarakat pengguna

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	Penempatan peserta pasca latih tidak bisa serta merta bekerja dengan DUDI yang sudah menjalin kerja sama dengan BLK Semarang 1, dikarenakan setiap DUDI memiliki SOP dalam hal perekrutan staff, sehingga kerjasama dengan BLK Semarang 1 terbatas sampai pada tahap menempatkan pasca latih untuk menjadi peserta pemagangan program dari pihak DUDI	Risiko Operasional	Belum terjalinnya kemitraan/kerjasama antara BLK Semarang 1 dengan pihak Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)/Pelaku usaha dalam hal penempatan peserta latih	Penempatan peserta pasca latih di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) tidak dapat dilakukan dengan optimal	BLK Semarang 1 dan Alumni Peserta Pelatihan
141	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	Target Peserta Tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Peserta Pelatihan mengundurkan diri pada saat kegiatan pelatihan sedang berlangsung	Tidak tersedianya tenaga kerja yang kompeten sesuai perencanaan	BLK Semarang 1
142	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	Spesifikasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan barang	Risiko Operasional	Kurangnya pengawasan dan koordinasi secara berkala pada saat pelaksanaan pengadaan barang	Spec barang tidak sesuai dengan spec pemesanan	BLK Semarang 1
143	Sasaran Program	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	Tidak terinformasikan nya program Pelatihan di BLK Semarang bagi para pencari kerja	Risiko Operasional	Informasi yang tidak tersampaikan bagi para pencari kerja terkait program pelatihan di BLK Semarang 1 yang berdampak kurangnya jumlah animo sehingga tidak dapat dilakukan rekrutmen di BLK Semarang 1 dan tidak tersedianya peserta pelatihan	kurangnya jumlah animo sehingga BLK Semarang 1 kurang maksimal dalam melakukan proses rekrutmen kepada para pencari kerja calon peserta pelatihan sehingga kurang maksimal dalam proses rekrutmen	BLK Semarang 1, kurangnya animo para pencari kerja calon peserta pelatihan, Masyarakat Para Pencari kerja yang tidak mendapatkan informasi terkait program pelatihan di BLK Semarang 1
144	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jika terjadi kekosongan maupun cuti alasan penting pada Pelaksanaan Transaksi Keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	Risiko Operasional	Pejabat Pelaksanaan Transaksi Keuangan kosong atau cuti alasan penting	realisasi keuangan tidak bisa mencapai target 100%	BLK Semarang 1
145	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak tercapainya target kegiatan	Risiko Operasional	Di dalam Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat sub kegiatan penyediaan bahan logistik (BBM kendaraan dinas dan genset)	jika terjadi kenaikan harga BBM maka akan berpengaruh pada realisasi target kegiatan	BLK Semarang 1

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kurang tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga teknis kegiatan, jasa komunikasi dan listrik	Risiko Operasional	Kurangnya tenaga jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah seperti tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga teknis kegiatan dan anggaran jasa berlangganan listrik	Terganggunya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah dan terganggunya kegiatan operasional seperti pelatihan yang ada di BLK Semarang 1 (karena pelatihan di BLK Semarang 1 membutuhkan Daya listrik yang cukup besar)	BLK Semarang 1 dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pelatihan
147	Sasaran Program	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terganggunya kegiatan yang ada di BLK Semarang 1 yang disebabkan tidak terpeliharanya sarana/prasarana kantor	Risiko Operasional	Banyaknya sarpras yang dimiliki BLK Semarang 1 membutuhkan pemeliharaan rutin, seperti AC, alat pendingin, gedung, kendaraan operasional, dll	Kurangnya pemeliharaan sarpras BLK Semarang 1 akan mengganggu kelancaran kegiatan seperti administrasi perkantoran dan pelatihan tenaga kerja.	BLK Semarang 1 dan Masyarakat

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat	3	4	12	Ada	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparaturnya pegawai di daerah (Kab/Kota/Prov) dalam menyusun dokumen RTKD - Melakukan review terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah tiap tahun - Untuk menilai keakuratan hasil perkiraan 6 indikator dalam RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS pada tiap tahunnya - Menyampaikan hasil analisis untuk bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja - Meningkatkan pemanfaatan dokumen RTKD bagi SKPD terkait yang menyusun renstra dan renja OPD mengacu pada dokumen RTKD	Memadai	2	5	10
Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah.	4	4	16	Ada	- Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan - Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Memadai	2	5	10
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	3	4	12	Ada	- Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi - Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Memadai	2	5	10
Pemberdayaan masyarakat kurang tepat sasaran	3	4	12	Ada	- Penyuluhan di masyarakat tentang peluang kerja di sektor informal - Kolaborasi dan Kerjasama lintas sektor dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor informal	Memadai	2	5	10
Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	4	4	16	ada	Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan, pembekalan, pengembangan aplikasi	Memadai	2	5	10
Calon transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	3	4	12	Ada	Sosialisasi, koordinasi dengan Pusat dan Daerah Kab/Kota	Memadai	2	5	10
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	2	5	10	Ada	Pembinaan: PP/PKB; LKS Bipartit; Struktur dan Skala Upah; kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	Memadai	3	3	9
Gratifikasi pada pengesahan PP dan pendaftaran PKB	3	4	12	Ada	Peningkatan integritas Pegawai	Memadai	2	5	10
Pemalsuan dokumen Surat Keterangan Layak K3 oleh a. Perusahaan pemilik alat K3 (Obyek K3) b. Pihak Penguji Independen (PJK3) dan dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan	3	5	15	Ada	- Aplikasi SIKATIGA yang menggunakan barcode rentan untuk disalahgunakan, sehingga membutuhkan kebijakan dan langkah strategis baik dalam penyempurnaan aplikasi SIKATIGA tersebut dan untuk memitigasi terjadinya pemalsuan dokumen Uji K3 - Mengusulkan kepada Kemaker untuk menghentikan kegiatan operasional PJK3 yang melakukan pemalsuan dokumen Surat keterangan Layak K3 di wilayah Jawa Tengah	Memadai	2	5	10
Adanya potensi gratifikasi dalam pengurusan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SK P2K3) apabila dilakukan dengan tatap muka.	3	5	15	Ada	Mengembangkan Sistem pengurusan SK P2K3 secara Online (SI-P2K3 Jateng) untuk meniadakan tatap muka dalam pengurusan SK P2K3	Memadai	2	5	10
Tujuan dan Sasaran /Program/ Kegiatan OPD (Disnakertrans Prov. Jateng) tidak mencapai target.	3	4	12	Ada	- pegawai diberikan pemahaman mengenai pengelolaan risiko di unit Kerja masing-masing identifikasi risiko - Peningkatan pemahaman pegawai terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi	Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masih ada Pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari Disnakertrans Prov. Jateng	3	4	12	Ada	- Memberikan pemahaman melalui Sosialisasi / pelatihan/ bimtek, media informasi kepada pegawai Disnakertrans tentang jenis pelayanan yang diberikan oleh Disnakertrans Jateng termasuk informasi yang dikecualikan - Mengharuskan petugas pelayanan informasi untuk bekerja sesuai dengan SOP	Memadai	2	5	10
1. Kab/Kota masih belum tepat dalam menyusun kebijakan dan indikator yang ditunjukkan dalam membangun ketenagakerjaan 2. Resiko SDM Dinas kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM perusahaan banyak yang tidak memahami pentingnya RTK Mikro di perusahaan dan kemanfaatannya	3	4	12	Ada	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparatur/ASN/pegawai kab/kota/provinsi dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di masing-masing daerah. - Melakukan review terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun - Menyampaikan laporan nilai keakurasian indikator hasil proyeksi indikator RTKD tersebut dan realisasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Sasaran manfaat/peserta pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/penempatan/perlindungan dan sebagainya diarahkan sesuai dengan yang dibutuhkan/kebutuhan tenaga kerja yang tercakup dalam dokumen RTKD dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau dapat dilihat dari RTK Mikro di Perusahaan (Yang akan dilaporkan dalam Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan/WLKP).	Memadai	2	5	10
Terganggunya Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah / tidak berjalan dengan lancar	3	3	9	Ada	Dari pihak kantor selalu memberikan peringatan kepada ASN yang belum melaksanakan absen harian pada hari itu juga sebelum jam absen habis Mengingatkan kepada yang bersangkutan kelengkapan dokumen terkait dengan usulan KGB Menganjurkan kepada ASN untuk segera melengkapi dokumen administrasi masing masing guna kelengkapan data.	Belum Memadai	4	2	8
Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	3	4	12	Ada	Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Evaluasi kinerja RKPD/Renja, Renstra, dan Desk Evaluasi kinerja per triwulan yang diput pada aplikasi econtrolling kinerja	Memadai	3	3	9
Terganggunya Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah / tidak berjalan dengan lancar	3	3	9	Ada	Dari pihak kantor selalu memberikan peringatan kepada ASN yang belum melaksanakan absen harian pada hari itu juga sebelum jam absen habis Mengingatkan kepada yang bersangkutan kelengkapan dokumen terkait dengan usulan KGB Menganjurkan kepada ASN untuk segera melengkapi dokumen administrasi masing masing guna kelengkapan data.	Memadai	2	2	4
Beberapa LPK belum bersertifikat atau belum terakreditasi	3	4	12	Ada	Dilakukan Bimtek Akreditasi dan melakukan pembinaan ke Kab/Kota	Memadai	2	2	4
Kualitas produksinya belum memenuhi standar yang ditentukan	3	4	12	Ada	1.Pengumpulan Data Pelatihan dan Produktivitas dari 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah 2.Melaksanakan Forum Sinergitas Produktivitas 3.Meningkatkan Produktivitas di Perusahaan (Unit Peningkatan Produktivitas Perusahaan) 4.Melakukan Pendampingan kepada Perusahaan untuk Penghargaan Paramakarya	Belum Memadai	3	3	9
Pencari tenaga kerja memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan cukup rendah	3	4	12	Belum Ada	Melakukan sosialisasi, pelatihan singkat, dan melaksanakan Uji Kompetensi	Belum Memadai	2	2	4
Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan / atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, miss match dan sebab lainnya)	3	4	12	Ada	1. Penyusunan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 2. Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Kapasitas kepada Pencari Kerja, Calon Pencari Kerja, Calon Tenaga Kerja dan Masyarakat 3. Penyebarluasan Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Kerja Prosedural	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pencari Kerja/ Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	3	4	12	Ada	1. Memperketat seleksi calon peserta baik secara administratif maupun teknis 2. Pendampingan memulai usaha terhadap peserta pemberdayaan sejak awal kegiatan sampai pasca kegiatan	Belum Memadai	3	4	12
Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	3	4	12	Ada	berkoordinasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendapatkan alokasi penempatan transmigrasi yang lebih besar dan dapat mendapatkan alokasi tambahan untuk pengisian lokasi yang masih kosong dan luncuran	Belum Memadai	3	3	9
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	3	4	12	Ada	Pembinaan : PP/PKB; LKS Bipartit; Struktur dan Skala Upah; kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	Memadai	3	4	12
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	3	4	12	Ada	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Memadai	3	4	12
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	3	4	12	Ada	pembinaan penyusunan struktur dan skala upah ke perusahaan, dialog hubungan industrial dengan serikat pekerja/serikat buruh. rapat dewan pengupahan dengan pembahasan struktur dan skala upah.	Memadai	3	3	9
Perusahaan tidak menerapkan struktur dan skala upah	3	4	12	Ada	Pembinaan penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan	Memadai	3	3	9
1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5. Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	4	5	20	Ada	1. Melakukan pembinaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 3. Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada perusahaan dan pengawas ketenagakerjaan; 4. Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan; 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam peningkatan penerapan norma ketenakerjaan; 6. Melakukan monitoring hasil pembinaan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan 7. Melakukan penanganan kasus ketenagakerjaan; 8. Memonitoring hasil penanganan kasus ketenagakerjaan; 9. Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam penanganan kasus ketenagakerjaan; 10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus ketenagakerjaan 11. Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan 12. Memberikan pembinaan norma K3 kepada pengusaha/pemberi kerja, pekerja/buruh atau SP/SB; 13. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian K3 di perusahaan; 14. Memonitoring hasil Pemeriksaan Norma K3 di Perusahaan; 15. Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam penerapan K3 di Perusahaan ; 16. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam penerapan K3 di perusahaan.	Memadai	3	4	12
Kegiatan pelatihan yang tidak diimbangi dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang menanganinya	2	2	4	Ada	Dengan Melibatkan instruktur Non Asn	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	3	3	9	Ada	Dari pihak kantor selalu memberikan peringatan kepada ASN yang belum melaksanakan absen harian pada hari itu juga sebelum jam absen habis Meningatkan kepada yang bersangkutan kelengkapan dokumen terkait dengan usulan KGB Menganjurkan kepada ASN untuk segera melengkapi dokumen administrasi masing masing guna kelengkapan data.	Memadai	3	3	9
Program Pelatihan tidak tepat sasaran / peserta dilatih bukan merupakan pengangguran	2	3	6	Ada	1. Melakukan proses seleksi dengan beberapa tahapan (berkas, tertulis dan test wawancara) 2. Melakukan sosialisasi 3. Membuat SOP	Memadai	2	2	4
Peserta pelatihan calon transmigrasi tidak hadir pada saat pelaksanaan pelatihan	2	3	6	Ada	1. Melakukan komunikasi efektif dengan stakeholder terkait 2. Melakukan komunikasi intens di internal OPD	Memadai	2	2	4
Pelayanan kepegawai yang ada di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan maksimal	2	3	6	Ada	1. Memaksimalkan pegawai yang ada 2. Up skilling bagi pegawai yang ada di pelayanana umum 3. sharing Knowledge	Memadai	2	2	4
Hasil pelatihan peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan tidak signifikan terhadap lulusan/ alumni pelatihan	3	1	3	Ada	Melakukan bimbingan konsultasi produktivitas	Memadai	2	1	2
Skill lulusan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan DUDI	3	2	6	Ada	Melakukan kerjasama dengan DUDI (Apindo dan Kadin) agar terjadi hubungan simbiosis mutualis dalam penyerapan lulusan pelatihan	Memadai	2	2	4
Penerapan hasil bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas tidak dilaksanakan secara berkesinambungan	3	2	6	Belum Ada	1. Direncanakan untuk menyusun payung hukum untuk mentaati peraturan dalam penerapan peningkatan produktivitas pada dunia usaha (difasilitasi bidang Lattas) 2. Upgrade penerapan alat, teknik, metode peningkatan produktivitas	Belum Memadai	3	2	6
Banyak perusahaan tidak menerapkan pengukuran produktivitas perusahaan	3	2	6	Ada	Memasifkan anjuran penerapan SIMPPRO melalui media sosial	Memadai	2	2	4
Tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum perkantoran, kepegawaian, dan keuangan	3	3	9	Ada	Penyusunan anggaran rencana belanja barang/jasa mengacu pada SHB	Belum Memadai	2	2	4
Hubungan Kerja yang tidak kondusif antara Pekerja dan Pengusaha	4	4	16	Ada	Dengan melakukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	Memadai	3	3	9
Terganggunya Kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Risiko Operasional	3	3	9	Ada	diajukan perubahan	Memadai	2	2	4
Terganggunya kegiatan pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah	3	3	9	Ada	diajukan pada perubahan	Memadai	2	2	4
Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau timbulnya penyakit akibat kerja di perusahaan	3	4	12	Ada	Melakukan pembinaan K3 di perusahaan	Memadai	3	3	9
Terganggunya kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	3	3	9	Ada	Segera memenuhi kebutuhan kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Memadai	2	2	4
Tidak sesuai realisasi anggaran yang diberikan dengan rencana yang diajukan	2	3	6	Ada	Mengoptimalkan SDM, sarana dan prasarana yang ada	Belum Memadai	2	2	4
Target Peserta Tidak Terpenuhi	2	2	4	Ada	Melaksanakan wawancara secara detail dan menyiapkan peserta cadangan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terganggunya Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah / tidak berjalan dengan lancar	3	3	9	Ada	Dengan segera memenuhi kebutuhan Kegiatan Operasional pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Memadai	1	1	1
Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan tidak tepat	3	4	12	Ada	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparaturnya pegawai di daerah (Kab/Kota/Prov) dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) - Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Memadai	2	5	10
1. Kode rekening belanja tidak sesuai dengan peruntukan dan penganggaran; 2. Unit kerja tidak dapat membedakan kategori belanja yang menambah asset atau belanja habis pakai; 3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan; 4. Target kinerja program/kegiatan tidak mencapai target yang direncanakan dalam Renstra, Renja, RKPD; 5. Kurang cermatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan inputing dokumen perencanaan dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran.	3	4	12	Ada	Sosialisasi, Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi, Rapat Koordinasi Teknis antara Pusat dan Daerah, Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Rapat POK), Sosialisasi SPIP MR, Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender /PPR; Desk Perencanaan yang terintegrasi dengan Manajemen Resiko, Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender /PPRG, Desk Evaluasi Kinerja, Desk Rencana Aksi Daerah (RAD) Kemiskinan, RAD SDGs, RAD Pangan Gizi, Desk Manajemen Resiko dsb.	Memadai	3	3	9
Dokumen administrasi keuangan tidak tepat waktu	3	3	9	Ada	- Mengikuti sertakan pegawai untuk sosialisasi / bimtek/pelatihan penyusunan laporan keuangan - melakukan rekonsiliasi SPJ / keuangan dan pajak	Memadai	2	2	4
Timbulnya kerusakan Aset/Barang Milik Daerah yang lebih luas/besar	3	3	9	Ada	dengan menambah pagu anggaran pada saat perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
penerimaan/pendapatan/retribusi daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	3	3	9	Ada	dilakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya pegawai yang mengikuti Diklat	3	3	9	Ada	Selalu Menginformasi pimpinan masing-masing apabila pegawai mau mengikuti diklat	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya target kegiatan	3	3	9	Ada	Selalu mengkonfirmasi setiap ada surat undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan	Memadai	2	2	4
Tidak terpenuhinya target pengadaan barang milik daerah	3	3	9	Ada	Melibatkan beberapa pihak di luar pemilik resiko ketika pengadaan Pengawasan berjenjang	Memadai	2	2	4
Kurang tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga teknis kegiatan, jasa komunikasi dan listrik	3	3	9	Ada	dengan menambah pagu anggaran pada saat perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya target kegiatan	3	3	9	Ada	dengan menambah pagu anggaran pada saat perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
Peserta yang tidak kompeten	3	3	9	Belum Ada	Diberikan sosialisasi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki	Belum Memadai	2	2	4
Tidak terserapnya peserta magang menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan	3	3	9	Ada	1. Melakukan sosialisasi program dan verifikasi terhadap kebutuhan perusahaan serta kompetensi peserta yang akan mengikuti program, sehingga ditemukan kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, melaksanakan monitoring pelaksanaan magang 2. Melakukan sosialisasi program pemagangan luar negeri di Kab/kota dengan waktu yang lebih awal	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LPK yang tidak terakreditasi	3	3	9	Ada	Melakukan pembinaan LPK ke Kab/Kota	Memadai	3	3	9
Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas dimungkinkan tidak sesuai dengan yang di inginkan.	4	4	16	Ada	-Melaksanakan Forum Sinergitas Produktivitas -Menentukan persyaratan untuk perekrutan peserta -Monitoring paska kegiatan	Belum Memadai	3	4	12
Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	3	4	12	Ada	1. Penyebarluasan informasi peluang kerja dan mekanisme kerja 2. Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Kapasitas Pencari Kerja, Calon Tenaga Kerja dan Masyarakat 3. Peningkatan kapasitas lembaga dan petugas penempatan tenaga kerja	Belum Memadai	3	4	12
Sarana produktif tidak selesai terbangun sesuai rencana	3	4	12	Ada	- Menetapkan persyaratan pekerja padat karya merupakan warga yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan pertukangan - Membangun komitmen dengan pemerintah desa, untuk meneruskan/ menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dengan sistem swadaya masyarakat	Memadai	3	3	9
Peserta pemberdayaan, baik pencari kerja dan masyarakat tidak dapat melanjutkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	3	4	12	Ada	- Memperketat proses seleksi - Membentuk embrio koperasi untuk permodalan - Pendampingan usaha	Belum Memadai	3	3	9
Petugas lapangan tidak memahami tugas pendampingan wirausaha	3	4	12	Ada	Asistensi	Belum Memadai	3	3	9
Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	3	4	12	Ada	1. Penyebarluasan informasi peluang kerja dan mekanisme kerja 2. Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Kapasitas Pencari Kerja, Calon Tenaga Kerja dan Masyarakat 3. Peningkatan kapasitas lembaga dan petugas penempatan tenaga kerja	Belum Memadai	3	4	12
Peserta pemberdayaan, baik PMI Purna dan Keluarga PMI tidak bisa mengembangkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	4	3	12	Ada	Seleksi, Komitmen, Motivasi dan Pendampingan Usaha	Belum Memadai	3	3	9
Salah satu tujuan desmigratif berupa pengembangan usaha produktif tidak optimal	3	3	9	Ada	FGD dan Pembinaan	Belum Memadai	3	3	9
PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	3	4	12	Ada	Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, perangkat desa, asosiasi lembaga penempatan, asosiasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan, monitoring, penyelesaian permasalahan dan pencegahan penempatan PMI unprosedural	Belum Memadai	3	4	12
TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	4	3	12	Ada	Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan monitoring penggunaan TKA	Belum Memadai	3	4	12
Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	3	4	12	Ada	berkoordinasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendapatkan alokasi penempatan transmigrasi yang lebih besar dan dapat mendapatkan alokasi tambahan untuk pengisian lokasi yang masih kosong dan luncuran	Belum Memadai	3	3	9
Masih terdapat perusahaan belum memiliki PP/PKB	4	3	12	Ada	Sosialisasi/Bimtek penyusunan dan pembuatan PP/PKB	Memadai	2	3	6
Permasalahan terkait Hubungan Industrial dan Jamsos tidak termonitor dengan baik; Pekerja diperlakukan tidak adil; Banyak perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit	3	4	12	Ada	1. Monitoring data kinerja HI secara berkala 2. Instruksi ketepatanwaktuan penyampaian data 3. Monitoring data kinerja dan permasalahan HI secara berkala 4. Monitoring data kinerja HI secara berkala	Memadai	3	4	12
Perusahaan tidak menerapkan struktur dan skala upah	3	4	12	Ada	Melakukan upaya pembinaan ke perusahaan tentang penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Adanya penolakan formula penghitungan upah minimum yang diatur dalam UU dan PP menyebabkan kondisi Hubungan Industrial yang tidak kondusif; 2. Adanya rekomendasi UMK dari Bupati/Walikota yang tidak sesuai dengan ketentuan UU/PP.	3	4	12	Ada	1. Melakukan sosialisasi regulasi terbaru mengenai Upah Minimum; 2. Menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait ; 3. Mengadakan Rapat Koordinasi Pengupahan dengan unsur pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan Provinsi, 4. Melakukan pembinaan struktur dan skala upah di perusahaan; 5. Melakukan pembinaan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan; 6. Dilakukannya rapat Dewan Pengupahan Provinsi; 5. Memberikan pemahaman bahwa UM hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih diberlakukan struktur dan skala upah	Memadai	3	3	9
1. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 2. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja	4	4	16	Ada	1. Memberikan pembinaan norma ketenagakerjaan kepada pengusaha/pemberi kerja, pekerja/buruh atau SP/SB; 2. Melakukan penanganan kasus ketenagakerjaan; 3. Memonitoring hasil penanganan kasus ketenagakerjaan; 4. Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam penanganan kasus ketenagakerjaan; 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus ketenagakerjaan; 6. Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan.	Memadai	3	4	12
Terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	3	5	15	Ada	1. Memberikan pembinaan norma K3 kepada pengusaha/pemberi kerja, pekerja/buruh atau SP/SB; 2. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian K3 di perusahaan; 3. Memonitoring hasil Pemeriksaan Norma K3 di Perusahaan; 4. Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penerapan K3 di Perusahaan ; 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam penerapan K3 di perusahaan.	Memadai	2	5	10
1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	4	5	20	Ada	1. Melakukan pembinaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 3. Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada perusahaan dan pengawas ketenagakerjaan; 4. Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan; 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam peningkatan penerapan norma ketenakerjaan; 6. Melakukan monitoring hasil pembinaan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan	Memadai	3	4	12
Jumlah Terlaksananya Kerjasama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan penempatan lulusan dengan Perusahaan / Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	2	2	4	Ada	Membuat program pelatihan industri baru berdasarkan hasil dari Analisis Kebutuhan Pelatihan TNA	Memadai	2	2	4
Jumlah calon Pendaftar Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan masih tingkat	2	2	4	Ada	Melatih kembali seseorang untuk mempelajari keterampilan baru yang berbeda dari keterampilan yang mereka miliki saat ini	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya proses penempatan para peserta pelatihan	2	2	4	Ada	Memberikan peralatan tambahan kepada peserta untuk berwirausaha	Memadai	2	2	4
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	2	2	4	Ada	Dengan Mengajukan anggaran tambahan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya calon peserta pelatihan yang mendaftar dan dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri	2	2	4	Ada	Pihak BLK Cilacap Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memanggil peserta cadangan untuk menggantikan peserta pelatihan yang mengundurkan diri	Memadai	2	2	4
Terjadi antara realisasi fisik dan keuangan agak berbeda	3	3	9	Ada	Untuk langkah berikutnya diharapkan antara realisasi fisik dan keuangan balance atau seimbang	Memadai	3	3	9
Adanya surat yang masuk tidak sesuai dengan tanggal di surat sehingga kadang kadang terjadi keterlambatan informasi undangan pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	Selalu mengkonfirmasi setiap ada surat undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan	Memadai	3	3	9
Adanya tidak kesesuaian antara spek ajuan dengan pembelian	3	3	9	Belum Ada	-	Belum Memadai	3	3	9
Saat ini BLK tidak ada langganan surat kabar	2	2	4	Belum Ada	-	Memadai	2	2	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	9	Ada	Memprioritaskan kegiatan sesuai dana yang ada	Memadai	3	3	9
Lembaga yang mejalin kerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan bidang pelatihan yang diselenggarakan oleh Balatkertrans	3	3	9	Ada	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Memadai	2	2	4
Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan berkurang	3	4	12	Ada	Melakukan proses seleksi (interview dan dokumen) secara ketat Melakukan pengecekan dokumen	Memadai	2	3	6
Peserta pelatihan mengundurkan diri pada saat pelatihan berlangsung	3	4	12	Ada	Melaksanakan seleksi secara terstruktur (Dokumen dan wawancara) ada validasi dokumen	Memadai	2	3	6
Sarana yang dibelanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan	2	4	8	Ada	Melibatkan stakeholder internal pada saat menyusun perencanaan	Memadai	2	2	4
Dokumen hasil Training Needs Analysis tidak dapat digunakan untuk dasar perencanaan kegiatan pelatihan	2	4	8	Ada	Memilih petugas yang kompeten untuk melaksanakan TNA Melakukan Briefing kepada petugas sebelum TNA dilaksanakan	Memadai	2	2	4
Calon Transmigran mengundurkan diri pada saat akan dilakukan pelatihan	4	3	12	Ada	melakukan komunikasi efektif dengan stake holder terkait	Memadai	2	2	4
Jumlah honor yang diberikan melebihi ketentuan yang ada	2	4	8	Ada	Cek dan ricek dokumen sebelum melakukan pembayaran Melakukan rewu peraturan yang terkait ajuan koordinasi dengan Dinas Induk Sharing dengan instansi lain	Memadai	1	2	2
Penyediaan barang administrasi Umum perangkat daerah lebih kecil dari pada kebutuhan	3	3	9	Ada	Melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan	Memadai	2	2	4
Barang yang dibutuhkan tidak dapat belanjakan Harga barang melebihi pagu yang tersedia Barang yang dibutuhkan tidak tersedia di market place yang di tentukan oleh pemerintah	3	3	9	Ada	Jika terkait dengan TKDN maka bersurat kepada Sekda / Inspektorat Mencari penyedia yang menyediakan barang yang dibutuhkan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
adanya kenaikan tarif jasa / barang tertentu yang tidak diprediksi (listrik / telepon)	3	2	6	Ada	Melakukan proyeksi kenaikan tarif bagi jasa / barang penunjang urusan pemerintah daerah	Memadai	2	2	4
Jumlah sarana yang perlu diperbaiki lebih besar daripada anggaran yang tersedia	2	3	6	Ada	Melakukan identifikasi sarana yang memerlukan perbaikan dan potensi perbaikan	Memadai	1	2	2
Pergantian peserta di saat pelaksanaan pelatihan	4	1	4	Ada	Menyiapkan formulir kosong untuk mengisi perubahan peserta	Memadai	3	1	3
Ruangan lokasi pelaksanaan pelatihan tidak memadai (panas/ lantai pecah/ ambles/ bising)	3	3	9	Ada	Persyaratan ruangan pelatihan telah tercantum dalam Terms of Reference yang dikirimkan ke kabupaten/ kota	Belum Memadai	2	3	6
Kendala teknis dan sinyal internet untuk materi digital marketing	2	3	6	Ada	Persyaratan ruangan pelatihan telah tercantum dalam Terms of Reference yang dikirimkan ke kabupaten/ kota	Belum Memadai	1	3	3
Prasarana pelatihan kurang memadai di daerah	3	3	9	Ada	Persyaratan ruangan pelatihan telah tercantum dalam Terms of Reference yang dikirimkan ke kabupaten/ kota	Belum Memadai	2	3	6
Keragaman level pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penggunaan teknologi yang dibutuhkan	2	3	6	Ada	Persyaratan ruangan pelatihan telah tercantum dalam Terms of Reference yang dikirimkan ke kabupaten/ kota	Belum Memadai	1	3	3
Keterlambatan penyelenggara karena force majeure	1	4	4	Ada	Menggunakan Google Maps untuk mencari alternatif rute	Belum Memadai	1	3	3
Perwakilan perusahaan yang tidak dapat menghadiri kegiatan secara mendadak	4	3	12	Ada	Memberikan form kehadiran pada saat recruitment peserta dan melakukan follow up pada H-1 kegiatan	Memadai	2	2	4
Perusahaan tidak bersedia mengikutkan tenaga kerjanya untuk mengikuti pelatihan karena durasi dinilai cukup lama bagi perusahaan	1	2	2	Ada	Peningkatan awareness dalam peningkatan produktivitas ke perusahaan melalui kegiatan Productivity Gathering & Productivity Camp	Memadai	1	1	1
Peserta kurang mampu menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan	2	3	6	Ada	Memberikan simulasi dan studi kasus pada saat pelatihan untuk membantu peserta lebih memahami materi	Memadai	1	2	2
Peserta tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan di tempat kerjanya	3	3	9	Ada	Monitoring progress peserta per individu (secara sampling) pasca pelatihan	Belum Memadai	2	3	6
Peserta tidak lulus dalam uji kompetensi	2	4	8	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	4	8
Lulusan pelatihan belum dapat maksimal ditempatkan/ membuka usaha	3	4	12	Belum Ada	Memperluas jaringan untuk potensi kerjasama penempatan lulusan BLK Semarang 2	Belum Memadai	2	4	8
Tidak terpenuhinya pelayanan peningkatan sarana pelatihan kerja	3	3	9	Ada	Penyusunan anggaran rencana belanja barang/jasa sesuai dengan SHB	Belum Memadai	3	2	6
Perusahaan yang melakukan kerjasama meminta durasi hari pelatihan lebih singkat dari pada seharusnya	3	2	6	Ada	Menambah JP atau memadatkan materi pelatihan	Memadai	2	1	2
Perusahaan tidak bersedia mengikuti prosedur bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas	3	2	6	Ada	Peningkatan awareness dalam peningkatan produktivitas ke perusahaan melalui kegiatan Productivity Gathering & Productivity Camp	Memadai	2	2	4
Perusahaan tidak bersedia diukur produktivitas tenaga kerjanya	2	4	8	Ada	Peningkatan awareness dalam peningkatan produktivitas ke perusahaan melalui kegiatan Productivity Gathering & Productivity Camp	Memadai	1	4	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	3	4	12	Ada	Peningkatan awareness dalam peningkatan produktivitas ke perusahaan melalui kegiatan Productivity Gathering & Productivity Camp	Memadai	2	4	8
Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang kurang tepat	2	2	4	Ada	Distribusi pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah berdasarkan SK melekat, dengan pemetaan personel dan tugas melekat	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	3	3	9	Ada	Penyusunan anggaran rencana belanja barang/jasa sesuai dengan SHB	Belum Memadai	3	2	6
Tidak terpenuhinya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2	6	Ada	penyusunan perencanaan belanja barang/jasa sesuai dengan SHB berlaku. Dalam pelaksanaannya harus dilengkapi dengan SPK. Belanja barang/jasa menggunakan e-purchasing	Memadai	2	2	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai	3	2	6	Ada	penyusunan perencanaan anggaran belanja barang/jasa berdasarkan SHB	Belum Memadai	2	2	4
Terjadinya perselisihan ketenagakerjaan (HI dan Penempatan TK)	4	4	16	Ada	Fasilitasi, konsultasi dan monev kasus ketenagakerjaan	Memadai	4	3	12
Masih tingginya perselisihan Hubungan Industrial	3	4	12	Ada	Dengan Mengupayakan klarifikasi dan mediasi guna menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersama (PB)	Memadai	3	3	9
Masih tingginya perselisihan penempatan tenaga kerja dan kasus Pekerja Migran Indonesia	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam pembinaan dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia	Memadai	3	3	9
Peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam penanganan terjadinya PHK	Memadai	3	3	9
Jika terjadi kekosongan pada pelaksanaan Transaksi Keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	3	3	9	Ada	diajukan perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
Jika terjadi kekosongan pada pelaksanaan Transaksi keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	3	3	9	Ada	Diajukan perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
Tidak Terpenuhinya target pengadaan barang milik daerah	3	3	9	Ada	diajukan perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
Tidak terpenuhinya Target pengadaan Barang Milik Daerah	3	4	12	Ada	diajukan pada anggaran perubahan	Memadai	3	3	9
3.tidak tercapainya target kegiatan	3	3	9	Ada	diajukan perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya target kegiatan	3	3	9	Ada	diajukan anggaran perubahan	Memadai	2	2	4
Tidak terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	3	4	12	Ada	Pengajuan di anggaran perubahan	Memadai	2	2	4
tidak tercapainya realisasi kegiatan	3	3	9	Ada	diajukan perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya realisasi kegiatan	3	3	9	Ada	diajukan anggaran perubahan	Memadai	2	2	4
tidak tercapainya realisasi Kegiatan	3	3	9	Ada	diajukan perubahan anggaran	Memadai	2	2	4
tidak tercapainya realisasi kegiatan	3	3	9	Ada	diajukan perubahan	Memadai	2	2	4
Meningkatnya angka kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja di perusahaan	3	4	12	Ada	Melakukan pengujian lingkungan kerja dan in-house training K3 bagi tenaga kerja di perusahaan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terganggunya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	2	4	Ada	Melakukan tertib administrasi keuangan	Memadai	1	1	1
Kerusakan sarana dan prasarana kantor	2	4	8	Ada	Mengasuransikan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Memadai	2	2	4
Terganggunya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	3	2	6	Ada	Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Memadai	2	2	4
Spesifikasi barang yang diadakan kurang sesuai dengan kebutuhan	3	4	12	Ada	Memilih produk barang TKDN dengan spesifikasi paling tinggi	Memadai	3	2	6
Jasa pelayanan umum tidak terselenggara dengan baik	2	3	6	Ada	Memilih vendor penyedia jasa pelayanan umum secara selektif	Memadai	2	2	4
Terjadinya kerusakan pada sarana operasional kantor	3	4	12	Ada	Melakukan pengadaan peralatan baru dan melaksanakan pemeliharaan sarana operasional kantor dengan skala prioritas	Memadai	2	3	6
Penempatan peserta pasca latih tidak bisa serta merta bekerja dengan DUDI yang sudah menjalin kerja sama dengan BLK Semarang 1, dikarenakan setiap DUDI memiliki SOP dalam hal perekrutan staff, sehingga kerjasama dengan BLK Semarang 1 terbatas sampai pada tahap menempatkan pasca latih untuk menjadi peserta pemagangan program dari pihak DUDI	1	1	1	Ada	Mengoptimalkan kerjasama antara BLK Semarang 1 dengan Dunia Usaha Dunia Industri sehingga peserta latih BLK Semarang 1 dapat terserap di Dunia Usaha Dunia Industri	Memadai	1	1	1
Target Peserta Tidak terpenuhi	2	2	4	Ada	Melaksanakan wawancara secara detail dan menyiapkan Peserta Cadangan	Memadai	2	2	4
Spesifikasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan barang	1	1	1	Ada	Melaksanakan pengawasan dan koordinasi secara berkala pada saat melaksanakan pengadaan barang	Memadai	1	1	1
Tidak terinformasikan nya program Pelatihan di BLK Semarang bagi para pencari kerja	2	2	4	Ada	meningkatkan Promosi Pelatihan kepada Masyarakat melalui Media Sosial atau Koordinasi dengan Kabupaten/Kota	Memadai	2	2	4
Jika terjadi kekosongan maupun cuti alasan penting pada Pelaksanaan Transaksi Keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	1	1	1	Ada	Menunggu petunjuk dan arahan dari Dinas	Memadai	1	1	1
Tidak tercapainya target kegiatan	2	2	4	Ada	dengan lebih efisien dalam penggunaan BBM, atau ditambahkan anggaran pada perubahan	Memadai	2	2	4
Kurang tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga teknis kegiatan, jasa komunikasi dan listrik	3	3	9	Ada	Dengan segera menambah atau mengganti tenaga jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah serta menambah anggaran untuk belanja tagihan listrik pada perubahan anggaran maupun untuk tahun anggaran selanjutnya agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar.	Memadai	1	1	1
Terganggunya kegiatan yang ada di BLK Semarang 1 yang disebabkan tidak terpeliharanya sarana/prasarana kantor	3	3	9	Ada	Pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, dan penambahan anggaran	Memadai	1	1	1

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing .
Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah.	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri
Pemberdayaan masyarakat kurang tepat sasaran	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertrans Jateng	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja	Pencari kerja tidak sesuai dengan harapan/keinginan
Calon transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama, calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya
Gratifikasi pada pengesahan PP dan pendaftaran PKB	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tidak sesuai dengan ketentuan	Ketidakpercayaan Publik pada Disnakertrans
Pemalsuan dokumen Surat Keterangan Layak K3 oleh a. Perusahaan pemilik alat K3 (Obyek K3) b. Pihak Penguji Independen (PJK3) dan dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan atau perusahaan pemilik obyek K3 ingin segera mendapat Surat keterangan Layak K3 untuk mengikuti tender /proyek.	- Keselamatan tenaga kerja di perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan integritasnya
Adanya potensi gratifikasi dalam pengurusan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SK P2K3) apabila dilakukan dengan tatap muka.	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Perusahaan ingin cepat mendapatkan SK P2K3 tersebut. - Ucapan terima kasih dari perusahaan yang mengurus SK P2K3 yang diwujudkan dalam bentuk barang/ makanan/ uang dsb	- Integritas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dipertanyakan konsistensinya - Menambah biaya bagi perusahaan yang mengurus SK P2K3

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Tujuan dan Sasaran /Program/ Kegiatan OPD (Disnakertrans Prov. Jateng) tidak mencapai target.	10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman pegawai Disnakertrans Jateng terhadap Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan, Sub kegiatan beserta indikator kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan Resiko oleh OPD (Disnakertrans Jateng). Dan tidak memahami perencanaan dan Penganggaran serta mekanismenya, baik itu Renstra OPD dan Renja OPD - Kurang pahamnya pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan kegiatan) - Kurang cermatnya dalam pelaporan kegiatan baik kinerja dan anggaran 	Banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang muncul sedangkan pembiayaan terbatas. Dan permasalahan ketenagakerjaan tidak semuanya bisa ditangani oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sendiri saja, tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait atau pun OPD pengampu sektoral lainnya
Masih ada Pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari Disnakertrans Prov. Jateng	10	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SOP yang belum optimal - Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap keterbukaan Informasi Publik masih belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pada masyarakat kurang optimal - Kurangnya Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap jenis pelayanan yang ada di OPD - Lambatnya pelayanan yang diberikan masyarakat karena penerapan SOP yang belum optimal
1. Kab/Kota masih belum tepat dalam menyusun kebijakan dan indikator yang ditunjukkan dalam membangun ketenagakerjaan 2. Resiko SDM Dinas kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM perusahaan banyak yang tidak memahami pentingnya RTK Mikro di perusahaan dan kemanfaatannya	10	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab/kota belum menyusun RTKD 2. Kurangnya perusahaan dari SDM yang membidangi ketenagakerjaan kab/kota untuk menyusun RTKD 3. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan SKPD terkait diluar Disnakertrans Kab/kota belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD 4. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan perusahaan tidak mengerti kegunaan/kemanfaatan RTK Mikro di perusahaan dalam keberwujudan tenaga kerja di perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan serta bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi adanya redesign budget, redesign program, redesign supply dan demand 5. Dinas Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum memanfaatkannya dan digunakan sebagai dasar dalam perancangan serta penganggaran pada dokumen perencanaan baik RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD. 6. SDM Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM di perusahaan di kab/kota tidak memahami penyusunan RTK Mikro di perusahaan serta manfaat atau kegunaan terkait pemberdayaan tenaga kerja di perusahaan maupun dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, 	Dinas Kab/kota tidak tepat dalam pemilihan dan penetapan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD. Sehingga akan menyebabkan ketidaktepatan dalam melakukan intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kabupaten/kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, Renstra, OPD, dsb).

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan / atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, miss match dan sebab lainnya)	12	Pencari Kerja, Calon Pencari Kerja, Tenaga Kerja, Masyarakat, Pemangku Kepentingan (Pemerintah dan Swasta)	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2. Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3. Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja
Pencari Kerja/ Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta / kelompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan <p>-Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik / masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejala di masyarakat, misalnya unjuk rasa</p>

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	-Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan -Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan pekerja/ buruh pada BPJS Ketenagakerjaan -Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/ masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/ buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa
1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5. Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	12	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan tidak tepat	10	Kasubbag Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - SDM tidak dapat menghitung persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja - SDM tidak dapat membaca indikator data terkait informasi makro (laju pertumbuhan, PDRB, dsb) - SDM kurang memahami potensi daerah - SDM di daerah bermutasi/bertukar dengan cepat 	SDM tidak dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja kedepannya seperti apa, sehingga kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan datang, belum bisa mengantisipasi/mengmitigasi
Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas dimungkinkan tidak sesuai dengan yang diinginkan.	12	Seksi Produktivitas Bidang Pelatihan dan Produktivitas	Sumber Daya Pelatihan (SDP) antara lain kurikulum, peserta, lokasi/tempat pelatihan serta sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> -Peserta tidak memahami materi, -Peserta tidak mengikuti pelatihan sampai selesai, - - Peserta tidak memahami materi, -Penyelenggara kurang selektif dalam merekrut peserta.
Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Pencari Kerja, Masyarakat, Calon Tenaga Kerja	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja
Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Pencari Kerja, Masyarakat, Calon Tenaga Kerja	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja
PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	12	Pencari Kerja Masyarakat Perusahaan/User Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2. Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3. Masih adanya egosektoral antar stakeholder penempatan PMI 4. Belum optimalnya penyebarluasan informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5. Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural 6. PMI belum siap bekerja ke luar negeri yang rentan permasalahan 	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	12	TKA Pemberi Kerja TKA Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2. Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3. Belum optimalnya penyebarluasan informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di daerah 4. Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan 	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Permasalahan terkait Hubungan Industrial dan Jamsos tidak termonitor dengan baik; Pekerja diperlakukan tidak adil; Banyak perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit	12	Kepala Bidang HI dan Jamsos	Data HI tidak Valid dan update; Pekerja dan Pengusaha tidak Memahami Syarat Kerja; Kurangnya pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan (dari 4.032 perusahaan yang wajib membentuk sampai dengan saat ini baru 1.910)	1. Kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tidak tepat 2. Kondisi HI tidak kondusif/ kurang harmonis 3. Mengganggu stabilitas produktivitas perusahaan
1. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 2. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja	12	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	1. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 2. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
Terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	10	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja 2. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	Tingginya Angka Kecelakaan kerja dan/atau penyakit Akibat Kerja
1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	12	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja
Terjadinya perselisihan ketenagakerjaan (HI dan Penempatan TK)	12	Kepala BP3TK Prov. Jateng	Rendahnya kesadaran Pengusaha dan pekerja akan pentingnya mentaati Norma Ketenagakerjaan	Rendahnya Perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan kurang tepat	10	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing .	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparatur pegawai di daerah (Kab/Kota/Prov) dalam menyusun dokumen RTKD - Melakukan reuiu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah tiap tahun - Untuk menilai keakurasian hasil perkiraan 6 indikator dalam RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS pada tiap tahunnya - Menyampaikan hasil analisis untuk bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja - Meningkatkan pemanfaatan dokumen RTKD bagi SKPD terkait yang menyusun renstra dan renja OPD mengacu pada dokumen RTKD	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah.	10	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan	Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan	- Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan - Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	10	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencari tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri	- Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi - Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemberdayaan masyarakat kurang tepat sasaran	10	Penentuan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan yang masuk ke Disnakertrans Jateng	Tidak terserapnya tenaga kerja baru di sektor informal	- Penyuluhan di masyarakat tentang peluang kerja di sektor informal - Kolaborasi dan Kerjasama lintas sektor dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor informal	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang belum dapat ditempatkan, karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja	10	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja	Pencari kerja tidak sesuai dengan harapan/keinginan	Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan, pembekalan, pengembangan aplikasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Calon transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi	10	Rentang waktu pemberangkatan cukup lama, calon transmigran mencari kerja yang lain	Penempatan transmigran tidak terpenuhi targetnya	Sosialisasi, koordinasi dengan Pusat dan Daerah Kab/Kota	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	6 bulan setiap tahun

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Gratifikasi pada pengesahan PP dan pendaftaran PKB	10	Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tidak sesuai dengan ketentuan	Ketidapercayaan Publik pada Disnakertrans	Peningkatan integritas pegawai khususnya Mediator Hubungan Industrial di Bidang HI Jamsos dan BP3TK	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Pemalsuan dokumen Surat Keterangan Layak K3 oleh a. Perusahaan pemilik alat K3 (Obyek K3) b. Pihak Penguji Independen (PJK3) dan dengan mencantumkan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa diketahui oleh pengawas yang bersangkutan	10	PJK3 ingin cepat memberikan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Layak Uji K3 di perusahaan tanpa dilakukan verifikasi K3 oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan atau perusahaan pemilik obyek K3 ingin segera mendapat Surat keterangan Layak K3 untuk mengikuti tender /proyek.	- Keselamatan tenaga kerja di perusahaan tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat hasil riksa uji yang dilaksanakan belum dinyatakan layak/belum diverifikasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis tertentu - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Pegawai pengawas ketenagakerjaan dirugikan nama baik dan integritasnya	- Konfirmasi kepada admin Aplikasi SIKATIGA untuk validasi nomor Surat Keterangan K3 yang ada di Perusahaan. - Mengusulkan kepada Kemnaker untuk menghentikan kegiatan operasional PJK3 yang melakukan pemalsuan dokumen Surat keterangan Layak K3 di wilayah Jawa Tengah.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember (setiap tahun)
Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Adanya potensi gratifikasi dalam pengurusan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SK P2K3) apabila dilakukan dengan tatap muka.	10	- Perusahaan ingin cepat mendapatkan SK P2K3 tersebut. - Ucapan terima kasih dari perusahaan yang mengurus SK P2K3 yang diwujudkan dalam bentuk barang/ makanan/ uang dsb	- Integritas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dipertanyakan konsistensinya - Menambah biaya bagi perusahaan yang mengurus SK P2K3	Menggunakan aplikasi pengurusan SK P2K3 secara Online (SI-P2K3 Jateng) untuk meniadakan tatap muka dalam pengurusan SK P2K3	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Tujuan dan Sasaran /Program/ Kegiatan OPD (Disnakertrans Prov. Jateng) tidak mencapai target.	10	- Kurangnya pemahaman pegawai Disnakertrans Jateng terhadap Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan, Sub kegiatan beserta indikator kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan Risiko oleh OPD (Disnakertrans Jateng). Dan tidak memahami perencanaan dan Penganggaran serta mekanismenya, baik itu Renstra OPD dan Renja OPD - Kurang pahalannya pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan kegiatan) - Kurang cermatnya dalam pelaporan kegiatan baik kinerja dan anggaran	Banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang muncul sedangkan pembiayaan terbatas. Dan permasalahan ketenagakerjaan tidak semuanya bisa ditangani oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sendiri saja, tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait atau pun OPD pengampu sektoral lainnya	- Pegawai diberikan pemahaman mengenai pengelolaan risiko di unit kerja masing-masing identifikasi risiko - Peningkatan pemahaman pegawai terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Masih ada Pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari Disnakertrans Prov. Jateng	10	- Penerapan SOP yang belum optimal - Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap keterbukaan Informasi Publik masih belum merata	- Pelayanan pada masyarakat kurang optimal - Kurangnya Pemahaman pegawai Disnakertrans terhadap jenis pelayanan yang ada di OPD - Lambatnya pelayanan yang diberikan masyarakat karena penerapan SOP yang belum optimal	- Memberikan pemahaman melalui Sosialisasi / pelatihan/ bimtek, media informasi kepada pegawai Disnakertrans tentang jenis pelayanan yang diberikan oleh Disnakertrans Jateng termasuk informasi yang dikecualikan - Mengharuskan petugas pelayanan informasi untuk bekerja sesuai dengan SOP	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1. Kab/Kota masih belum tepat dalam menyusun kebijakan dan indikator yang ditunjukkan dalam membangun ketenagakerjaan 2. Resiko SDM Dinas kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM perusahaan banyak yang tidak memahami pentingnya RTK Mikro di perusahaan dan kemanfaatannya	10	1. Kab/kota belum menyusun RTKD 2. Kurangnya perusahaan dari SDM yang membidangi ketenagakerjaan kab/kota untuk menyusun RTKD 3. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan SKPD terkait diluar Disnakertrans Kab/kota belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD 4. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan perusahaan tidak mengerti kegunaan/kemanfaatan RTK Mikro di perusahaan dalam keberwujudan tenaga kerja di perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan serta bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi adanya redesign budget, redesign program, redesign supply dan demand 5. Dinas Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum memanfaatkannya dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan serta penganggaran pada dokumen perencanaan baik RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD. 6. SDM Kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan SDM di perusahaan di kab/kota tidak memahami penyusunan RTK Mikro di perusahaan serta manfaat atau kegunaan terkait pemberdayaan tenaga kerja di perusahaan maupun dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, redesign supply dan demand	Dinas Kab/kota tidak tepat dalam pemilihan dan penetapan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD. Sehingga akan menyebabkan ketidaktepatan dalam melakukan intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kabupaten/kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, Renstra, OPD, dsb).	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparatur/ASN/pegawai kab/kota/provinsi dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di masing-masing daerah. - Melakukan review terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun - Menyampaikan laporan nilai keakurasian indikator hasil proyeksi indikator RTKD tersebut dan realisasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Sasaran manfaat/peserta pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/penempatan/perindungan dan sebagainya diarahkan sesuai dengan yang dibutuhkan/kebutuhan tenaga kerja yang tercakup dalam dokumen RTKD dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau dapat dilihat dari RTK Mikro di Perusahaan (Yang akan dilaporkan dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan/WLKP).	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan / atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, miss match dan sebab lainnya)	12	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	1. Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2. Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3. Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja	Optimalisasi Program Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi unsur Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dan Perantaraan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	Pencari Kerja/ Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	12	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta / kelompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat	1. Memperketat seleksi calon peserta baik secara administratif maupun teknis 2. Pendampingan memulai usaha terhadap peserta pemberdayaan sejak awal kegiatan sampai pasca kegiatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan	1. Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan 2. Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, membentuk LKS Bipartit, menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan -Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik / masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pembinaan : PP/PKB; LKS Bipartit; Struktur dan Skala Upah; kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	-Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan -Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan pekerja/ buruh pada BPJS Ketenagakerjaan -Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/ masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/ buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejala di masyarakat, misalnya	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember 2025
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5. Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	12	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	1. Monitoring hasil penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan 2. Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan	1. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 bulan
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan tenaga kerja yang ditetapkan tidak tepat	10	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - SDM tidak dapat menghitung persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja - SDM tidak dapat membaca indikator data terkait informasi makro (laju pertumbuhan, PDRB, dsb) - SDM kurang memahami potensi daerah - SDM di daerah bermutasi/bertukar dengan cepat	SDM tidak dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja kedepannya seperti apa, sehingga kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan datang, belum bisa mengantisipasi/mengmitigasi	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparaturnya pegawai di daerah (Kab/Kota/Prov) dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) - Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Peserta Pelatihan Produktivitas dimungkinkan tidak sesuai dengan yang diinginkan.	12	Sumber Daya Pelatihan (SDP) antara lain kurikulum, peserta, lokasi/tempat pelatihan serta sarana dan prasarana	-Peserta tidak memahami materi, -Peserta tidak mengikuti pelatihan sampai selesai, - - Peserta tidak memahami materi, -Penyelenggara kurang selektif dalam merekrut peserta.	-Melaksanakan Forum Sinergitas Produktivitas -Menentukan persyaratan untuk perekrutan peserta -Monitoring paska kegiatan	Pejabat setingkat eselon 4	Januari-Desember 2025
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja	Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Lintas Kab/Kota Program Penempatan Tenaga Kerja dan	Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja	12 bulan

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan / atau kembali ke pasar kerja	Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Lintas Kab/Kota Program Penempatan Tenaga Kerja dan	Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja	12 bulan
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	12	1. Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2. Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3. Masih adanya egosektoral antar stakeholder penempatan PMI 4. Belum optimalnya penyebaran informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5. Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural 6. PMI belum siap bekerja ke luar negeri yang rentan permasalahan	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, perangkat desa, asosiasi lembaga penempatan, asosiasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan, monitoring, penyelesaian permasalahan dan pencegahan penempatan PMI unprosedural	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	12	1. Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2. Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3. Belum optimalnya penyebaran informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di daerah 4. Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan monitoring penggunaan TKA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Permasalahan terkait Hubungan Industrial dan Jamsos tidak termonitor dengan baik; Pekerja diperlakukan tidak adil; Banyak perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit	12	Data HI tidak Valid dan update; Pekerja dan Pengusaha tidak Memahami Syarat Kerja; Kurangnya pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan (dari 4.032 perusahaan yang wajib membentuk sampai dengan saat ini baru 1.910)	1. Kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tidak tepat 2. Kondisi HI tidak kondusif/ kurang harmonis 3. Mengganggu stabilitas produktivitas perusahaan	1. Monitoring data kinerja HI secara berkala 2. Instruksi ketepatan waktu penyampaian data 3. Monitoring data kinerja dan permasalahan HI secara berkala 4. Monitoring data kinerja HI secara berkala	Kepala Bidang HI dan Jamsos	Triwulan IV 2025
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	1. Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 2. Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja	12	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	1. Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 2. Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	Melakukan Penanganan kasus Ketenagakerjaan	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 Bulan

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	10	1. Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja 2. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan	Tingginya Angka Kecelakaan kerja dan/atau penyakit Akibat Kerja	1. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan Norma K3 di tempat kerja 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Objek K3 di tempat kerja. 3. Pembinaan dan Pembentukan P2K3 di Perusahaan	1. Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma K3 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 bulan
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	1. Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2. Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	12	1. Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2. Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	1. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja	Pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 bulan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	Terjadinya perselisihan ketenagakerjaan (HI dan Penempatan TK)	12	Rendahnya kesadaran Pengusaha dan pekerja akan pentingnya mentaati Norma Ketenagakerjaan	Rendahnya Perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha	Mediasi kasus ketenagakerjaan(HI dan Penempatan TK)	Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	12 Bulan